

**HUBUNGAN DAN KEPENTINGAN TIMBAL-BALIK RRT-KOREA UTARA
DI SEMENANJUNG KOREA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

Oleh:

ANDI NUR LAELA SUDIRMAN

E 131 122 68

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : HUBUNGAN DAN KEPENTINGAN TIMBAL-BALIK
RRT-KOREA UTARA DI SEMENANJUNG KOREA

N A M A : ANDI NUR LAELA SUDIRMAN

N I M : E 131 12 268

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

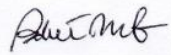
FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 2 Desember 2016

Mengetahui :

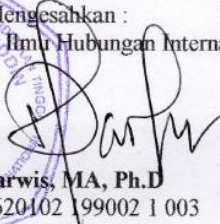
Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Patrice Lumumba, MA
NIP. 19611012 198701 1 001


Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si
NIP. 19760622 200812 1 002

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,


H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 19620102 199002 1 003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : HUBUNGAN DAN KEPENTINGAN TIMBAL-BALIK
RRT-KOREA UTARA DI SEMENANJUNG KOREA

N A M A : ANDI NUR LAELA SUDIRMAN

N I M : E 131 12 268

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis,
3 November 2016

Ketua : Drs. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

Anggota : 1. Drs. Patrice Lumumba, MA

2. Agussalim, S.IP, MIRAP

3. Burhanuddin, S.IP, M.Si



[Handwritten signatures of the evaluation team members]

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji dan syukur tak henti penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rezki yang telah dilimpahkan-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Hubungan dan Kepentingan Timbal-Balik RRT-Korea Utara di Semenanjung Korea” dapat penulis rampungkan. Dengan demikian, penulis telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Sejujurnya, rampungnya skripsi ini tidak terlepas dari do’a yang senantiasa dihaturkan oleh Ayahanda penulis, Andi Sudirman, begitu pula saudara(i) penulis, Ta Pawang dan Ta Untung, serta Kak Imma yang senantiasa memberikan suntikan semangat kepada penulis agar jauh dari berputus asa dalam prosesnya. Dan terkhusus pada ibunda , (Almarhumah) Sayati, penulis sangat ingin bilang, “anakmu hari ini ‘ada’ karena selalu mengingat peninggalanmu”.

Banyaknya kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki membuat skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA dan Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.Ip., M.Si yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
2. Bapak Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNHAS

3. Seluruh staf pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah berjasa membagi ilmu dan mengarahkan penulis selama beberapa tahun ini
4. Seluruh Staf Akademik FISIP, terutama Bunda dan Kak Rahma yang telah banyak membantu
5. Teman-teman HI angkatan 2012, Ros, Intan, Asti, Dian, Leli, Umi, Niniek, Ayu, yang selalu direpoti oleh penulis, dan juga Sani, Siska, Malik, Hasan, Ino, Gadis, Ahyar, Mersy, Bahri, teman seperjuangan pemburu skripsi, serta semua teman-teman HI 2012 yang tidak sempat penulis sebutkan namanya...
‘terima kasih’...
6. Teman sekampung-pindah-ke-kota, Mira, Wadda, Tanti, Wani, Ita, Susi,
‘suatu hari ayo kita berkumpul lagi!’

Akhirnya penulis hanya bisa berharap semoga segala rezki dan pahala senantiasa dilimpahkan kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian. Amin.

Makassar , Desember 2016

Penulis

ABSTRAKSI

Andi Nur Laela Sudirman, E 131 12 268, “Hubungan dan Kepentingan Timbal-Balik RRT-Korea Utara di Semenanjung Korea”, di bawah bimbingan Bapak Patrice Lumumba selaku pembimbing I dan Bapak Ashry Sallatu selaku pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini akan menjelaskan hubungan dan kepentingan timbal-balik antara RRT-Korea Utara di Semenanjung Korea. Penulis melakukan penelitian ini dengan mengacu pada dua tujuan, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menjelaskan hal yang mendasari hubungan timbal-balik RRT-Korea Utara di Semenanjung Korea, dan (2) untuk mengetahui dan menjelaskan wujud kepentingan RRT dan Korea Utara di Semenanjung Korea. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui deskriptif-analitik. Metode ini menjelaskan gambaran sistematis mengenai hubungan dan kepentingan timbal-balik RRT-Korea Utara di Semenanjung Korea. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan lewat telaah pustaka. Data dikumpulkan dari sejumlah literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dalam objek penelitian baik berupa buku dan artikel-artikel yang bersumber dari internet atau surat kabar. Data yang relevan dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif yakni dengan menghubungkan fakta-fakta yang satu dengan lainnya untuk menarik kesimpulan akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara RRT-Korea Utara yang masih berlangsung hingga saat ini pada dasarnya didasari oleh adanya kepentingan timbal-balik di antara kedua negara tersebut. Adapun wujud kepentingan timbal-balik antara RRT dan Korea Utara di Semenanjung Korea dapat jelas terlihat dalam kepentingan politik ideologis dan kepentingan keamanan strategis di antara keduanya. Hal ini dapat terjadi, dikarenakan kedua negara sama-sama memiliki kepentingan yang mendesak dalam mempertahankan rezim komunis dan keamanan di negaranya masing-masing. Adanya kesamaan latar belakang dari kedua negara tersebut membuat RRT dan Korea Utara saling membutuhkan dan akhirnya bekerjasama untuk mencapai kepentingan-kepentingan tersebut.

Kata Kunci : Hubungan, Kepentingan Timbal-Balik, RRT, Korea Utara, Politik Ideologis, Keamanan Strategis.

ABSTRACT

Andi Nur Laela Sudirman, E 131 12 268, “Relationship and Mutual Interests PRC-North Korea in Korean Peninsula”, supervised by Drs. Patrice Lumumba, MA as Supervisor I and Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si as Supervisor II, Departement of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to determine the relationship and mutual interests between PRC-North Korea in Korean Peninsula. The author did this research based on two purposes, which are: (1) to identify and explain the factors that enabled a mutual relationship between PRC-North Korea in Korean Peninsula, and (2) to identify and explain the manifestation of the interests of both PRC and North Korea in Korean Peninsula. The research methods used in this research is descriptive-analysis. This method explains a systematic overview of the relationship and mutual interests of PRC-North Korea in Korean Peninsula. The data used in this research was collected via literature review. The data were collected from a number of literatures that relevant with the main subject of the research object such as books and articles sourced from internet and newspapers. Relevant data were collected and then analyzed qualitatively by connecting facts with one to another to draw the final conclusions. The research results showed that the relationship between PRC-North Korea that has continued until today essentially based by mutual interest between the two countries. As for the manifestation of the mutual interest between PRC and North Korea in Korean Peninsula can be seen at the ideological political interests and security strategic interests between both countries. This can happen because the two countries had an interests to sustain the communist regime and security in their respective countries. The similar background of the two countries enable PRC and North Korea to seek each other and eventually work together to achieve those interests.

Key Word : Relationship, Mutual Interests, PRC, North Korea, Ideological Politics, Security Strategic.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Tentang Hubungan Bilateral.....	17
B. Konsep Tentang Kepentingan Nasional.....	21
C. Konsep Tentang Kawasan.....	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN RRT-KOREA UTARA DAN SEMENANJUNG KOREA	
A. Hubungan RRT-Korea Utara.....	34
1. Riwayat Hubungan.....	34
2. Kesamaan Ideologi.....	43
B. Semenanjung Korea.....	54
1. Lingkup Semenanjung Korea.....	54
2. Dinamika Semenanjung Korea.....	57
BAB IV SUBSTANSI KEPENTINGAN TIMBAL-BALIK RRT-KOREA UTARA	
A. Kepentingan Politik Ideologis.....	69
B. Kepentingan Keamanan Strategis.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional (*international relations*) secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu hubungan antarnegara atau antarbangsa (politik, militer, ekonomi, budaya dan lain sebagainya). Dalam perkembangannya, hubungan internasional ditandai dengan adanya interaksi dari dua negara atau lebih, yang mana tidak hanya membicarakan tentang seputar masalah konflik tetapi juga kerjasama, baik kerjasama bilateral maupun multilateral. Dari beberapa negara yang melakukan kerjasama, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Korea Utara merupakan dua negara yang memiliki hubungan bilateral yang erat.

Hubungan antara RRT dan Korea Utara pada dasarnya telah terjalin sejak masa lampau. Kedekatan jarak wilayah RRT dan Korea Utara secara geografis memungkinkan hal tersebut, yang mana Korea Utara berbatasan langsung dengan RRT di bagian utara. Seiring dengan perkembangannya, Korea Utara banyak menyerap kebudayaan yang berasal dari RRT. Ajaran-ajaran, seperti Buddhisme dan Taoisme atau Konfusianisme yang merupakan salah satu dari kebudayaan RRT yang diadaptasi oleh masyarakat Korea Utara, termasuk Korea Selatan. Dengan demikian, kebudayaan RRT tersebut turut ikut dalam membentuk pola pikir masyarakat Korea (Korea Utara dan Korea Selatan).

Berbicara mengenai hubungan antara RRT dengan Korea Utara, maka hal tersebut tidak terlepas dari peristiwa terpisahnya Korea Utara dan Korea Selatan. Pada mulanya, Korea Utara dan Korea Selatan merupakan satu negara kerajaan. Namun hal tersebut berubah ketika Perang Korea terjadi pada 25 Juni 1950-27 Juli 1953.¹ Sebagai hasil dari perang tersebut Korea terpisah menjadi dua bagian, yaitu Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) dan Republik Korea (Korea Selatan). Hingga saat ini, perang yang terjadi di antara kedua Korea masih belum selesai, sehingga baik Korea Utara maupun Korea Selatan berada dalam status gencatan senjata.

Peristiwa terpisahnya kedua Korea dimulai pada akhir Perang Dunia II. Jepang yang pada saat itu menguasai Korea (1910-1945) mengalami kekalahan dan menyerah tanpa syarat terhadap sekutu (Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris).² Dengan tujuan untuk mengawasi pelepasan Korea dari tangan Jepang, sekutu mulai menyebarkan pengaruhnya di Korea. Uni Soviet yang berideologi komunis di bagian utara Korea, sedangkan Amerika Serikat yang berideologi liberal di bagian selatan Korea. Namun, situasi berubah menjadi konflik ketika Uni Soviet dan Amerika Serikat yang sama-sama merupakan salah satu dari negara pemenang Perang Dunia II mulai melakukan persaingan ideologinya di Semenanjung Korea.

Di sisi lain, RRT pada saat itu mulai melakukan hubungan diplomatik dengan Korea Utara pada tahun 1949, yaitu ketika Mao Zedong berhasil

¹ Elok Dyah Messwati. *Panmunjom, Korea yang Terbelah*. Edisi 4 Januari 2015. Jakarta: Kompas., hal. 4.

² *Ibid.*

mempersatukan daratan Cina di bawah pengaruh partai komunisnya dan kemudian membentuk negara Republik Rakyat Cina, atau saat ini dikenal sebagai Republik Rakyat Tiongkok (RRT). RRT khawatir akan perkembangan yang terjadi di Semenanjung Korea, yang mana memungkinkan akan adanya invasi dari Amerika Serikat. RRT kemudian memutuskan untuk melakukan intervensi besar-besaran dengan mengutus bala tentaranya untuk membantu pasukan Korea Utara melawan Amerika Serikat dalam Perang Korea. Hal tersebut membuat Korea Utara sangat berutang budi terhadap RRT, karena dengan adanya bantuan pasukan dari RRT tersebut, komunis Korea Utara dapat mempertahankan rezimnya selama terjadinya Perang Korea. Keberadaan pasukan RRT di Korea Utara terus berlanjut hingga disepakatinya gencatan senjata pada tahun 1953, yang mana menghentikan sementara Perang Korea.³

Perang Korea diakhiri dengan ancaman nuklir Amerika Serikat, yang mana memaksa Korea Utara menyetujui perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1953. Ketakutan terhadap ancaman senjata nuklir akhirnya membuat Korea Utara memutuskan untuk memiliki senjata nuklirnya sendiri. Korea Utara kemudian memulai program nuklirnya pada tahun 1956, sehingga pada tahun 1965, Korea Utara berhasil mendirikan Akademi Militer Hamhung untuk melatih tentaranya dalam

³ Jae Kyu Park, Byung Chul Koh, dan Tae-Hwan Kwak. (1987). *The Foreign Relations of North Korea-New Perspectives*. Colorado: Westview Press., hal. 169.

mengembangkan rudal, serta didirikan pula pusat penelitian di Yongbyon untuk pengembangan fasilitas nuklir Korea Utara.⁴

Kepemilikan akan senjata nuklir sangat penting artinya bagi Korea Utara. Dengan memiliki nuklir, Korea Utara dapat memperkuat keamanannya, sehingga memungkinkannya menangkal ancaman senjata nuklir dari negara musuhnya, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Korea Utara juga dapat memperkuat posisi tawarnya (*bargaining position*) di dunia internasional, baik secara politik maupun ekonomi.

Dalam mewujudkan usaha Korea Utara tersebut, yang mana untuk memiliki nuklirnya sendiri, Korea Utara membutuhkan bantuan dari negara lain. RRT yang menyadari hal tersebut terus meningkatkan pengaruhnya di Korea Utara, yaitu dengan meningkatkan pemberian bantuan, baik dalam hal ekonomi maupun militer, terhadap Korea Utara pasca Perang Korea. Hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan RRT untuk membuat Korea Utara tidak beraliansi dengan negara lain, yang non-komunis, sehingga RRT tetap dapat mempertahankan Korea Utara sebagai rekan seideologinya.

Sebagai respon Korea Utara terhadap jasa-jasa RRT tersebut, Korea Utara banyak mencontohi kebijakan-kebijakan serta strategi militer RRT yang dianggap sesuai dengan pergerakan komunisnya, termasuk memusuhi Amerika Serikat. Korea

⁴ Alfina Farmaritia Wicahyani. (2010). Dampak Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara terhadap Kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur. *Pascasarjana Universitas Indonesia*, 20-56, hal 21. Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132725-T%2027803-Dampak%20pengembangan-Tinjauan%20literatur.pdf>. pada tanggal 30 November 2015.

Utara melihat kedekatannya dengan RRT sebagai sebuah kesempatan bagi Korea Utara untuk memperkuat serta mencapai kepentingan negaranya sendiri. Sehingga Korea Utara menyetujui adanya Traktat Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Timbal-Balik (*Treaty of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance*) pada 11 Juli 1961, dimana RRT secara resmi merangkul Korea Utara sebagai sekutu terdekatnya.⁵ Korea Utara merupakan negara satu-satunya dimana RRT sepakat untuk saling membantu baik dalam kondisi konflik maupun perang. Perjanjian tersebut masih berlaku hingga saat ini.

Dalam perjanjian tersebut, RRT dan Korea Utara menyepakati beberapa hal. Tiga kesepakatan utama dalam perjanjian tersebut⁶, yaitu pertama, kedua belah pihak sepakat untuk akan saling memberikan bantuan dalam konflik maupun perang, dengan demikian kedua negara saling menjamin keamanannya bersama. Kedua, RRT dan Korea Utara bersepakat untuk saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara. Ketiga, kedua negara sepakat akan melakukan kerjasama dalam baik dalam bidang ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan, yang mana hal tersebut akan menjadi langkah bagi kedua negara agar dapat lebih maju.

Tidak dapat dipungkiri bahwa komunis Korea Utara lebih dekat terhadap komunis RRT. Kemiripan yang dimiliki oleh RRT dan Korea Utara menjadi salah

⁵ *Treaty of Friendship, Cooperation and mutual Assistance Between the People's Republic of China and the Democratic People's Republic of Korea* (1961). Diakses dari https://www.marxists.org/subject/china/documents/china_dprk.htm, pada tanggal 14 maret 2016.

⁶ *Ibid.*

satu faktor penting. Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah RRT dan Korea Utara, yang mana pernah terterjajah oleh bangsa lain, sehingga membuat kedua negara memiliki sejarah perjuangan dalam merebut kebebasan mereka dari tangan para penjajah. Tidak hanya itu, sebagaimana yang dipaparkan oleh Park Jae Kyu, Koh Byung Chul, dan Kwak Tae-Hwan dalam bukunya *The Foreign Relations of North Korea*, bahwa revolusi komunis RRT dan Korea Utara yang berlangsung pada waktu yang kira-kira hampir bersamaan membuat kedua negara memiliki pemikiran yang sama, yaitu memperkuat akar paham komunis di negaranya masing-masing serta sikap kedua negara yang menentang pengaruh Barat (Amerika Serikat).⁷

Bagaimanapun, terpisah dari adanya kedekatan geografis, kesamaan ideologi, serta kemiripan sejarah di antara RRT dan Korea Utara, hubungan kedua negara tersebut pada dasarnya sebagian besar dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan serta kebutuhan yang harus segera dipenuhi oleh kedua negara dalam waktu yang hampir bersamaan. Pada saat runtuhnya Uni Soviet pada 1991 yang merupakan induk dari komunisme, dunia internasional hanya menyisakan RRT, Korea Utara, Vietnam, Laos, dan Kuba sebagai negara komunis yang tersisa. RRT dan Korea Utara menyadari ancaman terhadap rezim komunis di negaranya masing-masing.

Dengan demikian, Korea Utara hanya memiliki RRT sebagai sekutu terdekatnya. Begitupun sebaliknya, RRT berusaha untuk menopang Korea Utara, sehingga dapat mempertahankan legitimasi yang dimilikinya. Hal tersebut

⁷ Jae Kyu Park, Byung Chul Koh, dan Tae-Hwan Kwak. *Op. cit.*, hal. 172.

sebagaimana yang dikatakan oleh Devi Fitria bahwa jika makin banyak rezim komunis yang jatuh, maka akan semakin sulit pula bagi RRT untuk mengukuhkan legitimasinya.⁸

Keberlangsungan jalinan hubungan antara RRT-Korea Utara selama lebih dari 60 tahun, terhitung sejak 1949, tentu saja tidak lepas dari kepentingan timbal-balik yang dimiliki Korea Utara terhadap RRT, begitupun sebaliknya. Bagi Korea Utara, RRT merupakan sekutu yang selalu dapat diandalkan. RRT dapat melindungi Korea Utara dari sanksi internasional yang ditujukan kepadanya dengan hak veto yang dimiliki oleh RRT di Dewan Keamanan PBB. Korea Utara juga percaya bahwa bersekutu dengan RRT merupakan langkah bagi Korea Utara memperkuat negaranya dalam rangka untuk menangkal pengaruh Amerika Serikat yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedamaian di Asia dan dunia.

Di sisi lain, bagi RRT, Korea Utara merupakan daerah penyangganya (*buffer zone*). RRT membutuhkan Korea Utara untuk tetap berdiri kokoh, sehingga kekhawatiran RRT bahwa Amerika Serikat dapat menduduki Korea Utara dan kemudian menginvasi wilayah RRT tidak terjadi. Untuk itu, RRT bersedia menyokong sebagian besar perekonomian Korea Utara, yang mana 90% pasokan minyak, 80% barang jadi, dan 45% bahan pangan Korea Utara merupakan hasil

⁸ Devi Fitria. *Persepsi China tentang Korea Utara*, dimuat pada tanggal 22 Desember 2010. Diakses dari <http://historia.id/mondial/persepsi-china-tentang-korea-utara> pada tanggal 23 Maret 2016.

sumbangan dari RRT.⁹ Kekhawatiran RRT tersebut berdasar karena RRT berbatasan langsung dengan Korea Utara. RRT memerlukan Korea Utara sebagai zona pemisah dengan kawasan yang bersahabat dengan Amerika Serikat, seperti Korea Selatan dan Jepang. Dengan demikian, RRT pun berusaha mempertahankan *status quo* di Semenanjung Korea.

Sebagaimana yang diketahui, wilayah Semenanjung Korea, yang mana mencakup Korea Utara dan Korea Selatan, telah sejak lama dijadikan sebagai destinasi kepentingan geopolitik dari negara-negara lain. Hal tersebut jelas terlihat pada peristiwa Perang Korea, yaitu ketika Uni Soviet dan Amerika Serikat berebut pengaruh atas Semenanjung Korea. Dalam hal ini, berbicara mengenai posisi strategis Semenanjung Korea yang dikelilingi oleh lima negara dengan kekuatan militer terbesar (RRT, Rusia, Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat) dan dikelilingi oleh lima negara *capable* nuklir terbesar (Rusia, RRT, Korea Utara, Jepang dan Amerika Serikat) menjadikan wilayah Semenanjung Korea tersebut sebagai salah satu zona terpanas di dunia.¹⁰ Dengan demikian, isu nuklir menjadi salah satu pembahasan yang paling mendesak di Semenanjung Korea.

Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan Semenanjung Korea, RRT bekerjasama dengan komunitas internasional untuk menghalau persebaran serta pengembangan nuklir di kawasan Asia Timur, khususnya di Semenanjung Korea.

⁹ Matthias von Hein. *Simalakama Cina di Semenanjung Korea*, dimuat pada tanggal 27 Juni 2013. Diakses dari <http://www.dw.com/id/simalakama-cina-di-semenanjung-korea/a-16911717>. pada tanggal 30 November 2015.

¹⁰ Budiman Djoko Said. *Petak Umpet Versus Korea Utara di Semenanjung Korea*, dimuat tanggal 29 April 2015. Diakses dari <http://www.fkpmaritim.org/petak-umpet-versus-korut-di-semenanjung-korea/>, pada tanggal 1 Februari 2016.

Namun, pengembangan senjata nuklir yang terus dilakukan Korea Utara menyebabkan terjadinya peningkatan eskalasi konflik di Semenanjung Korea. Hal tersebut dikarenakan oleh kemungkinan terjadinya efek domino, yang mana membenarkan negara-negara lain di kawasan Asia Timur untuk ikut mengembangkan nuklirnya sendiri.

Isu nuklir menjadi satu-satunya ‘batu sandungan’ dalam hubungan RRT dan Korea Utara. Mengingat hubungan baik yang telah lama terjalin di antara kedua negara, RRT sangat berpotensi untuk berhasil dalam membujuk Korea Utara untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir yang dilakukannya. Menyadari pentingnya masalah tersebut, akhirnya penulis mengangkat penelitian yang berjudul **“Hubungan dan Kepentingan Timbal-Balik RRT-Korea Utara di Semenanjung Korea”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Penelitian ini akan membahas tentang riwayat hubungan antara RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan Korea Utara yang kemudian berujung pada kepentingan timbal-balik kedua negara tersebut di Semenanjung Korea. Karena kepentingan timbal-balik antara RRT-Korea Utara mencakup banyak bidang, seperti olahraga, keamanan, politik, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi hanya

pada data-data yang menunjukkan substansi kepentingan timbal-balik RRT-Korea Utara pada dua bidang, yaitu politik ideologis dan keamanan strategis.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari hubungan timbal-balik RRT-Korea Utara di Semenanjung Korea?
2. Bagaimana wujud kepentingan RRT dan Korea Utara di Semenanjung Korea?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hal yang mendasari hubungan timbal-balik RRT-Korea Utara di Semenanjung Korea.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan wujud kepentingan RRT dan Korea Utara di Semenanjung Korea.

2. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan tersebut tercapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam masalah hubungan dan kepentingan timbal-balik RRT-Korea Utara di Semenanjung Korea.
2. Menjadi sumber informasi publik, kalangan penstudi ilmu hubungan internasional khususnya dan semua kalangan secara umum, serta sumber informasi bagi pemerintah, khususnya dalam masalah hubungan dan kepentingan timbal-balik RRT-Korea Utara di Semenanjung Korea.

D. Kerangka Konseptual

Hubungan antar negara dalam dunia internasional salah satunya mencakup tentang kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional tersebut akan dipertemukan berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat terpenuhi di dalam negerinya sendiri. Kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan akan memunculkan kepentingan yang beraneka ragam dan mengakibatkan berbagai masalah sosial. Sehingga, untuk mencari solusinya diperlukan suatu kerjasama internasional yang dapat memudahkan pencapaian kepentingan-kepentingan tersebut.

Meskipun demikian, isu terpenting dari kerjasama internasional ini adalah sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat

mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.¹¹ Manakala kepentingan di antara negara yang bekerjasama berlangsung harmonis, maka negara-negara tersebut akan bertindak untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi secara bersama. Namun, pada saat terjadi pertentangan kepentingan di antara negara-negara yang bekerjasama tersebut, maka persaingan, permusuhan, ketegangan, kekhawatiran, serta bahkan perang bisa saja terjadi.

Demikian pula dengan hubungan kerjasama antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Korea Utara. Sebagaimana yang diketahui, RRT adalah sekutu tradisional Korea Utara. Kedekatan RRT dengan Korea Utara, baik secara geografis, budaya, ideologi, maupun diplomatik ditambah dengan adanya pengalaman sejarah yang hampir sama, semakin mendekatkan hubungan keduanya. Hubungan kerjasama antara RRT dan Korea Utara telah diikat dalam perjanjian persahabatan yang telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun. Dalam perkembangannya, hubungan kerjasama tersebut ada kalanya menyatukan kepentingan kedua belah pihak, tetapi adapula kalanya bertentangan. Namun demikian, fakta bahwa hubungan antara RRT dan Korea Utara yang masih berlangsung hingga saat ini membuktikan bahwa kedua negara dapat berkompromi terhadap kepentingan satu sama lain. Dengan demikian, selama RRT maupun Korea Utara memiliki kepentingan terhadap satu sama lain, maka hubungan kerjasama di antara RRT dan Korea Utara akan tetap dipertahankan.

¹¹ Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya., hal. 33-34.

Di sisi lain, berbicara mengenai kepentingan, RRT dan Korea Utara memiliki kepentingan satu sama lain, yang mana berkaitan dengan situasi di Semenanjung Korea. Korea Utara membutuhkan RRT untuk menyokong perekonomiannya. Sedangkan RRT membutuhkan Korea Utara untuk tetap stabil sebagai daerah penyangga yang menjadi pemisah dari pengaruh Amerika Serikat di Asia Timur, khususnya Semenanjung Korea, serta sebagai sekutu yang berideologi sama untuk memperkuat legitimasinya. Sebagaimana yang diketahui, kepentingan nasional merupakan kepentingan negara sebagai *unitary* aktor yang penekanannya pada peningkatan *national power* (kekuatan nasional) untuk mempertahankan keamanan nasional dan *survival* dari negara tersebut.¹² Tidak hanya itu, kepentingan nasional juga mencakup tentang pembangunan ekonomi yang disubordinasikan sebagai elemen dari kekuatan nasional.¹³

Didasari oleh kepentingan nasional untuk melindungi keamanan dan kedaulatan nasionalnya dari ancaman serangan nuklir atau invasi Amerika, Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklirnya. Walaupun hal tersebut memicu krisis keamanan di Semenanjung Korea serta menempatkan RRT pada posisi sulit yang menyebabkan pertentangan dalam hubungan di antara keduanya, RRT hingga saat ini tetap mempertahankan Korea Utara sebagai sekutunya. Selain itu, adanya perebutan pengaruh kekuasaan antara RRT dan Amerika Serikat di kawasan Asia, khususnya Asia Timur, juga menjadi alasan RRT tetap mempertahankan hubungan baik dengan

¹² Aleksius Jemadu. (2014). *Politik Global dalam Teori dan Praktik Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu., hal. 52.

¹³ *Ibid.*

Korea Utara. Bagaimanapun, RRT dan Korea Utara memiliki kepentingan di Semenanjung Korea. Dengan demikian, sebagaimana yang dikatakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Kamus Hubungan Internasional (Edisi Ketiga) yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda, yaitu kepentingan nasional juga merupakan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.¹⁴

Bagaimanapun, RRT dan Korea Utara, masing-masing mendiami kawasan yang sama, yaitu Asia Timur. Sehingga tindakan ataupun kebijakan luar negeri yang dijalankan baik oleh RRT maupun Korea Utara akan berdampak pula pada stabilitas kawasan Asia Timur, khususnya di Semenanjung Korea. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, bahwa kawasan sebagai dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial, dan sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan.¹⁵ Adapun interaksi antar negara dalam kawasan, lagi menurut Perwita dan Yani, terdiri atas empat variabel, yaitu sifat dan tingkat kohesivitas aktor yang akan menentukan tingkat interaksi di antara mereka, sifat komunikasi dalam kawasan, tingkat *power* yang dimiliki aktor kawasan, dan struktur hubungan antar aktor dalam kawasan.¹⁶

¹⁴ Jack C. Plano dan Roy Olton. (1999). *Kamus Hubungan Internasional (Edisi Ketiga)*. Alih bahasa: Wawan Juanda. Universitas Michigan Barat., hal. 7.

¹⁵ Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani. *Op.cit.*, hal. 104.

¹⁶ Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani. *Op.cit.*, hal. 104-105.

Banyaknya perubahan yang terjadi dalam hubungan internasional berakibat pula pada perubahan terhadap pandangan regionalisme. Perwita dan Yani menanggapi perubahan-perubahan tersebut dengan membedakan regionalisme lama dan baru (*old and new regionalism*) dalam lima kategori.¹⁷ Kategori pertama berupa dasar dibentuknya regionalisme; kategori kedua mengarah pada perbedaan inisiatif terbentuknya regionalisme; kategori ketiga berupa sifat atau orientasi dari regionalisme; kategori keempat mengacu pada lingkup kegiatan dari kerjasama regional; dan kategori terakhir mengacu pada hubungan antar aktor yang terlibat dalam kerjasama kawasan. Sebagaimana yang diketahui, kerjasama antar negara dalam suatu kawasan dilakukan dalam rangka untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan demikian, adanya kerjasama kawasan tersebut, negara-negara telah sepakat untuk berintegrasi dengan melakukan distribusi kekuasaan di antara mereka demi untuk mencapai tujuan bersama.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe deskriptif-analitik, yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai kasus atau fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut relevan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari uraian tersebut selanjutnya akan dianalisis, sehingga akan berujung pada kesimpulan yang sifatnya analitik. Metode deskriptif digunakan

¹⁷ *Ibid.*

untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai hubungan dan kepentingan timbal-balik RRT (Republik Rakyat Tiongkok)-Korea Utara di Semenanjung Korea.

2. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan pembahasan yang telah ditentukan, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai literatur dan hasil olahan dari sumber terkait, seperti buku, jurnal, koran, artikel, majalah, dan situs-situs pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data teoritis tersebut kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ditentukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode telaah pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, koran, artikel, serta beberapa situs pendukung. Data-data yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengkaji fenomena-fenomena yang dibahas dalam penelitian. Adapun literatur tersebut diperoleh melalui Perpustakaan Universitas Hasanuddin di Makassar.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif, dimana data yang diperoleh dari berbagai literatur tersebut kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada yang selanjutnya dijelaskan dan

dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akhirnya dapat disusun dalam suatu tulisan serta ditarik suatu kesimpulan. Pokok analisa dalam penelitian ini adalah hubungan dan kepentingan timbal-balik RRT-Korea Utara di Semenanjung Korea.

5. Metode Penulisan

Penulis menggunakan metode penulisan dengan pola deduktif. Pola ini menggambarkan permasalahan yang diteliti secara umum, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dengan menampilkan data-data disertai analisis penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk dapat menguraikan dan menjelaskan masalah dalam penelitian ini diperlukan beberapa konsep dasar. Konsep-konsep tersebut selanjutnya akan menjadi acuan pemikiran yang menuntun penulis dalam menguraikan dan menjelaskan masalah dalam penelitian ini. Adapun konsep-konsep tersebut diantaranya, yaitu konsep tentang hubungan bilateral, konsep tentang kepentingan nasional, dan konsep tentang regionalism. Berikut merupakan penjabaran dari ketiga konsep tersebut:

A. Konsep Tentang Hubungan Bilateral

Dewasa ini, dalam dunia internasional interaksi yang terjadi antara negara tidak hanya terbatas pada konflik dan persaingan kekuatan, melainkan terdapat pula yang dinamakan dengan hubungan bilateral (*bilateralism*) yang didasari oleh kerjasama. Pada masa tradisional, negara-negara lebih banyak menggunakan kekuatan militer untuk meraih kepentingan dan kesejahteraannya. Namun, berbeda halnya pada masa globalisasi saat ini, negara-negara lebih condong kepada menjalin hubungan kerjasama, sehingga dapat mencapai kepentingannya yang berujung pada kesejahteraannya terpenuhi.

Hubungan bilateral merupakan hubungan yang terjalin di antara dua negara. N. Ganesan dan Ramses Amir mendefinisikan hubungan bilateral, yaitu:

*two countries ... (ceding) particular privileges to one another that they do not give to other countries. Bilateralism also involves the normative belief among policymakers from both countries that dealings between them on most issues should be primarily dealt with through one-to-one governmental links...*¹⁸

Ketika suatu negara mengakui kedaulatan negara lain dan sepakat untuk membangun suatu hubungan diplomatik, kedua negara akan melakukan pertukaran agen diplomatik yang merupakan duta untuk memfasilitasi dialog maupun kerjasama yang akan dipertukarkan. Hubungan bilateral tersebut selanjutnya akan mempengaruhi atau dijalankan bersama oleh kedua pihak dan mengikat keduanya dalam perjanjian bilateral.

Perjanjian bilateral lebih mudah untuk dilakukan daripada perjanjian multilateral, lagi menurut Ganesan dan Amir:

“Bilateralism is premised on specific reciprocity, which means the simultaneous balancing of specific quid pro quos by each party with every other at all times (in contrast to multilateralism’s diffuse reciprocity)”.¹⁹

Perjanjian bilateral lebih kuat dan lebih dapat mengatasi masalah negara-negara. Dengan perjanjian bilateral, negara-negara dapat memperoleh persyaratan yang lebih baik daripada tergabung dalam forum-forum multilateral. Banyaknya pertemuan kepentingan yang dimiliki oleh negara-negara dalam forum multilateral membuat negara-negara hanya banyak menyetujui, namun susah dalam mengaplikasikan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati, berbeda halnya dalam

¹⁸ N. Ganesan dan Ramses Amir. (2010). *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism*. Singapore: ISEAS Publishing., hal. 18.

¹⁹ *Ibid.*

perjanjian bilateral yang hanya melibatkan pertemuan kepentingan dari dua negara sehingga lebih mudah untuk bekerjasama demi mencapai kepentingan yang lebih spesifik.

Hubungan bilateral berupa hubungan timbal-balik dan saling mempengaruhi antara dua negara, yang mana dijalin oleh kedua pihak atas dasar keinginan untuk bekerjasama. Adanya perbedaan kepentingan antara satu negara dengan negara lain sering kali menjadi alasan yang dapat memicu terjadinya ketegangan bahkan konflik. Dengan adanya hubungan bilateral di antara dua negara, kepentingan yang tidak dapat dipenuhi oleh kedua pihak dalam negerinya sendiri akan dipertemukan dalam kerjasama yang mendasari hubungan bilateral tersebut. Dengan kata lain, kerjasama muncul sebagai solusi atas berbagai masalah yang timbul dari pemenuhan kepentingan-kepentingan tersebut. Hubungan bilateral dapat terjalin pada bidang-bidang khusus yang sesuai dengan tujuan-tujuan spesifik yang menjadi dasar negara ingin bekerjasama dengan negara lain. Hubungan bilateral dapat berupa kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, militer ataupun kebudayaan.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada hubungan bilateral yang dilakukan oleh RRT dan Korea Utara. Adapun bentuk kerjasama bilateral yang dilakukan oleh RRT dan Korea Utara berupa kerjasama dalam bidang ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kerjasama dalam bidang ekonomi bertujuan untuk memenuhi pembangunan perekonomian di kedua negara, sedangkan kerjasama dalam bidang budaya dan ilmu pengetahuan akan menjadi langkah bagi kedua negara agar dapat

lebih maju. Selain itu, RRT dan Korea Utara juga bersepakat untuk saling membantu jika negaranya berada dalam kondisi konflik maupun perang, sehingga dengan demikian, kedua negara saling menjamin keamanan bersama.

Terselenggaranya kerjasama bilateral tidak terlepas dari adanya kesamaan kedua negara dalam usahanya mewujudkan kepentingan nasional negaranya masing-masing. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton dalam Kamus Hubungan Internasional (Edisi Ketiga) yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda, bahwa pada saat kepentingan di antara negara-negara berlangsung harmonis, maka negara-negara tersebut akan bertindak untuk menaggulangi permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama.²⁰ Kepentingan tersebut kemudian membuat kedua negara memiliki sifat ketergantungan antara satu sama lain.

Terjadinya hubungan bilateral tidak menuntut pada kedekatan geografis dari kedua negara yang bekerjasama. Dengan semakin tingginya saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain membuat jarak bukanlah hambatan yang berarti. Apalagi pada zaman globalisasi sekarang ini jangkauan transportasi maupun komunikasi dapat lebih mudah diakses, sehingga memungkinkan dua negara menjalin hubungan bilateral walaupun letak geografis masing-masing negaranya berjauhan.

Dalam hal ini, RRT dan Korea Utara tidak hanya berdekatan secara geografis, namun keduanya juga memiliki kedekatan sejarah maupun ideologi yang sama. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa RRT dan Korea Utara memiliki saling ketergantungan yang besar. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan bilateral

²⁰ Jack C. Plano dan Roy Olton. *Op. cit.*, hal. 7.

di antara kedua negara telah terjalin sejak masa lampau, sehingga membuat RRT dan Korea Utara sebagai sekutu tradisional. Hubungan kerjasama bilateral yang telah berlangsung lama dapat secara tidak langsung melahirkan keterikatan bagi kedua negara atas dasar kepentingan nasionalnya masing-masing, yang mana dapat dengan mudah melahirkan kerjasama baru dalam bidang-bidang lain, sehingga jika negara satu sedang bermasalah maka negara lainnya akan memberikan bantuannya demi kepentingan nasionalnya.

Kerjasama bilateral yang terjalin antara RRT dan Korea Utara tentunya didasari oleh harapan untuk mendapatkan keuntungan dari adanya kerjasama tersebut. Sebagaimana yang diketahui, bahwa adanya kerjasama akan melahirkan kesepakatan yang berupa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua negara demi kelangsungan harmonisasi hubungan keduanya. Kesepakatan tersebut kemudian akan melahirkan kebijakan yang nantinya akan membawa keuntungan bagi kedua negara yang bekerjasama, baik untuk RRT maupun Korea Utara. Keuntungan yang didapat nantinya tidak terlepas dari kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh kedua negara, baik RRT maupun Korea Utara.

B. Konsep Tentang Kepentingan Nasional

Negara di dalam dunia internasional dipandang sebagai aktor yang saling berinteraksi dalam arena politik internasional, yang mana tidak memiliki otoritas tunggal yang terpusat, dipenuhi tindakan kekerasan yang sarat akan tuntutan-tuntutan,

dan tanpa adanya kesetiakawanan.²¹ Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Mohtar Mas'ood:

“Bagaimana begitu banyak bangsa yang berbeda dapat hidup bersama dalam suatu suasana campuran antara kebebasan dan saling-ketergantungan; dalam suatu dunia yang pengaturannya tidak sepenuhnya mereka sepakati tetapi tidak ada satupun yang bisa mengendalikannya sendiri; suatu dunia yang merupakan tempat bergantung semua negara demi perdamaian, kebebasan, kebahagiaan, dan keberlangsungan hidup mereka sendiri”.²²

Dari pandangan tersebut, *national interest* (kepentingan nasional) yang hadir karena adanya keterbatasan dan sifat *single minded* yang melekat pada negara dianggap sangat vital. Sehingga negara sebagai aktor yang berperan sebagai pengambil keputusan dan terlibat langsung dalam arena politik internasional mengupayakan cara terbaik untuk mengejar kepentingan nasional yang sebelumnya telah dirumuskan dalam kebijakan luar negeri dan akhirnya diperjuangkan. Kepentingan nasional mendasari maupun mengarahkan pembuat keputusan dalam menyusun strategi ataupun merumuskan kebijakan luar negeri negaranya.²³

Fakta bahwa setiap negara berbuat sama, yaitu mengejar kepentingan nasionalnya sendiri, membuat seluruh kesepakatan internasional bersifat sementara dan kondisional atas keinginan negara-negara untuk mematuhi.²⁴ Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang

²¹ P. Anthonius Sitepu. (2011). *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu., hal. 163.

²² Mohtar Mas'ood. (1994). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia., hal. 34.

²³ *Ibid.*

²⁴ Robert Jackson dan Georg Sorensen. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hal 89.

menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara.²⁵ Negara yang dipandang sebagai esensi dasar bagi kehidupan warga negaranya merumuskan kepentingan nasional yang memuat kepentingan vital negara yang terkait dengan eksistensinya, seperti pertahanan; keamanan; militer; dan kesejahteraan ekonomi, sehingga perjanjian-perjanjian dan semua persetujuan; konvensi; kebiasaan; aturan; bahkan hukum dapat dikesampingkan demi tercapainya kepentingan nasional tersebut.

Secara realis, kepentingan nasional merupakan kepentingan negara sebagai *unitary* aktor yang penekanannya pada peningkatan *national power* (kekuatan nasional) untuk mempertahankan keamanan nasional dan *survival* (kelangsungan hidup) dari negara tersebut.²⁶ Dengan adanya *power*, suatu negara dapat mengembangkan dan memelihara kontrolnya terhadap negara lain, yang mana hubungan kekuasaan atau pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui jalan pemaksaan ataupun kerjasama, sehingga dengan adanya *power* yang dimiliki, negara tersebut dapat bertahan (*survive*) dalam dunia politik internasional.²⁷

P. Anthonius Sitepu melihat konsep kepentingan nasional inheren dengan kelangsungan hidup yang tercipta dari adanya kepentingan minimum, yang mana kemampuan minimum yang dimaksudkan adalah kemampuan negara untuk mempertahankan integritas wilayahnya (*physical identity*); mempertahankan identitas politik (*political identity*); serta mempertahankan rezim-rezim ekonomi-politiknya.²⁸

²⁵ Jack C. Plano dan Roy Olton. *Op. cit.*, hal. 7.

²⁶ Aleksius Jemadu. *Loc. cit.*

²⁷ Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani. *Op.cit.*, hal. 35.

²⁸ P. Anthonius Sitepu. *Op. cit.*, hal 165.

Namun permasalahannya terdapat pada menentukan kepentingan nasional, seberapa luas cakupan dan seberapa jauh intensitas kepentingan nasional suatu negara, serta cara yang seharusnya digunakan untuk menghubungkan kepentingan suatu negara dengan kepentingan negara lain.²⁹

Dengan demikian, Miroslav Nincic dalam buku ‘Politik Global dalam Teori dan Praktik’ karya Aleksius Jemadu menjabarkan tiga kriteria atau asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk mendefinisikan kepentingan nasional.³⁰ Pertama, kepentingan nasional harus bersifat vital sehingga pencapaiannya menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. Kedua, kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional, yaitu pencapaian kepentingan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan internasional. Ketiga, kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok, atau lembaga pemerintahan, sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan.

Terdapat perbedaan antara kepentingan nasional yang bersifat vital (esensial) dan kepentingan nasional yang bersifat non-vital (sekunder). Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup dari negara tersebut serta mengandung nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya; sedangkan kepentingan nasional yang bersifat non-vital merupakan kebalikannya, yaitu tidak memiliki hubungan secara langsung dengan

²⁹ P. Anthonius Sitepu. *Op. cit.*, hal 166-167.

³⁰ Aleksius Jemadu. *Op. cit.*, hal. 52

eksistensi negara namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri.³¹ Dengan demikian, melihat pentingnya kepentingan vital bagi sebuah negara, maka tidaklah berlebihan jika ketika kepentingan vital suatu negara dipertaruhkan dalam interaksinya dengan aktor lain, maka negara tersebut akan menggunakan segala instrumen yang dimilikinya termasuk kekuatan militer untuk mempertahankan kepentingan tersebut.

Kepentingan nasional dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara.³² Seperti halnya ketika RRT memutuskan untuk menopang perekonomian Korea Utara, yang mana tindakan RRT tersebut didasarkan pada kepentingan nasionalnya, yaitu untuk menjamin Korea Utara tetap berdiri kokoh sebagai daerah penyangganya yang dapat membentengi RRT dari kekuasaan Amerika Serikat serta sebagai sekutu yang berideologi sama untuk memperkuat legitimasinya. Demikian pula ketika Korea Utara melakukan pengembangan program nuklir berkaitan dengan kepentingan nasionalnya, yaitu untuk memperkuat keamanan negaranya serta memperkuat posisi tawar Korea Utara di dunia internasional, baik secara politik maupun ekonomi.

Dalam suatu hubungan tidak hanya berkisar pada damai ataupun perang. Hubungan antara RRT dan Korea Utara yang telah lama terjalin membuktikan bahwa kedua negara tersebut telah banyak menyesuaikan kepentingan yang dimilikinya satu sama lain, sehingga keduanya dapat bekerjasama dalam mencapai kepentingan-

³¹ *Ibid.*

³² Mohtar Mas'ood. *Op.cit.*, hal. 139.

kepentingan tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh P. Anthonius Sitepu, yang mana berasumsi bahwa sistem internasional tidak selalu berkisar pada keharmonisan ataupun peperangan, karena pada tingkatan tertentu ada saja konflik maupun ancaman perang yang dapat diminimalisir dengan cara menyesuaikan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan jalan diplomatik.³³

Bagaimanapun, hubungan bilateral yang terjalin di antara RRT dan Korea Utara dilandasi atas keuntungan dan keamanan timbal-balik dan bukannya berdasarkan pada ikatan ideologis maupun moral. Pada intinya negara-negara harus mementingkan pencapaian kepentingan nasionalnya terlebih dahulu sebelum merisaukan asas moralitas yang belum tentu memenuhi kepentingan negaranya.³⁴ Dengan demikian, fakta bahwa RRT dan Korea Utara telah lama menjalin hubungan kerjasama bilateral, yang mana telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun, membuktikan bahwa baik RRT maupun Korea Utara masih saling berkepentingan antara satu sama lain dan hubungan antar kedua negara tersebut masih efektif dalam pencapaian keuntungan timbal-balik kedua negara, RRT dan Korea Utara.

C. Konsep Tentang Kawasan

Sebagaimana yang diketahui, interaksi dalam dunia internasional diwarnai oleh konflik dan kerjasama. Dalam melakukan kerjasama yang didasari oleh keinginan negara-negara untuk mengejar kepentingannya, kadang kala terdapat

³³ P. Anthonius Sitepu. *Op. cit.*, hal 167.

³⁴ Mohtar Mas'ood. *Op.cit.*, hal. 143.

perbedaan sudut pandang dan kepentingan nasional yang dapat memicu terjadinya konflik. Sebaliknya, dalam konflik solusi-solusi yang dipilih untuk mengatasinya biasanya adalah kerjasama. Regionalisme (studi tentang kawasan) merupakan studi yang lebih melihat pada proses-proses yang melatarbelakangi terbentuknya kerjasama regional, yaitu daya ikat yang dapat menyatukan negara-negara yang berdekatan secara geografis dalam suatu wadah kerjasama regional. Regionalisme menjadi penting untuk dibahas ketika suatu permasalahan global diperlukan penanganan dalam lingkup kerjasama yang lebih kecil, yaitu pada tataran regional.

Harus ada batas-batas geografis yang jelas sehingga konsep regionalisme ini dapat lebih mudah dipahami. Dengan demikian, untuk memahami regionalisme lebih jauh, terlebih dahulu harus dipahami *region* (kawasan) itu sendiri. *Region* dimisalkan sebagai wadah sedangkan regionalisme adalah isinya. Nuraeni S, Deasy Silvy, dan Arifin Sudirman mendefinisikan kawasan, yaitu “Pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional”.³⁵ Pendapat lain mengenai kawasan, menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, bahwa kawasan sebagai dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial, dan sejarah dan perasaan identitas yang

³⁵ Nuraeni S, Deasy Silvy, dan Arifin Sudirman. (2010). *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hal. 1.

seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan.³⁶

Lagi, menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, konsep regionalisme bersifat *ambiguous*, yang mana suatu pembagian kawasan yang didasarkan pada aspek keamanan mungkin dapat berbeda dari suatu pembagian kawasan yang didasarkan pada aspek ekonomi.³⁷ Adapun empat kriteria dari suatu kawasan menurut Perwita dan Yani, yaitu:³⁸

1. Kriteria geografis: mengelompokkan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan, dan lain sebagainya seperti Eropa dan Asia.
2. Kriteria politik/militer: mengelompokkan negara-negara berdasarkan keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO, dan non-blok.
3. Kriteria ekonomi: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti GNP, dan *output* industri, misalnya negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang atau terkebelakang.
4. Kriteria transaksional: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang, dan jasa, seperti imigran turis, perdagangan dan berita, contoh: Pasar Tunggal Eropa.

³⁶ Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani. *Loc. cit.*

³⁷ _____. *Op.cit.*, hal. 103-104.

³⁸ *Ibid.*

Adapun pendapat lain mengenai kriteria suatu kawasan yang dikemukakan oleh Nuraeni S, Deasy Silvy, dan Arifin Sudirman, yaitu adanya suatu kemiripan sosiokultural; sikap politik atau perilaku eksternal yang mirip yang biasanya tercermin pada voting dalam sidang-sidang PBB; keanggotaan yang sama dalam organisasi-organisasi supra-nasional atau antar pemerintah; interdependensi ekonomi yang diukur dengan kriteria perdagangan sebagai proporsi pendapatan nasional; dan kedekatan geografik yang diukur dengan jarak terbang antara ibukota-ibukota negara tersebut.³⁹

Banyaknya perubahan yang terjadi dalam hubungan internasional berakibat pula pada perubahan terhadap pandangan regionalisme. Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani menanggapi perubahan-perubahan tersebut dengan membedakan regionalisme lama dan baru (*old and new regionalism*) dalam lima kategori.⁴⁰ Kategori pertama, regionalisme lama pada dasarnya merupakan warisan Perang Dingin, dimana regionalisme dibentuk berdasarkan kalkulasi ideologi dan keamanan. Sedangkan terbentuk berdasarkan struktur interaksi yang lebih bersifat multipolar.

Kategori kedua mengarah pada perbedaan inisiatif regionalisme, yaitu apabila regionalisme lama kerap kali dibentuk melalui intervensi negara-negara adikuasa, maka regionalisme baru lebih bersifat spontan yang berasal dari kebutuhan dari dalam kawasan itu sendiri. Hal tersebut karena negara-negara di kawasan

³⁹ Nuraeni S, Deasy Silvy, dan Arifin Sudirman. *Op. cit.*, hal. 2-3.

⁴⁰ Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani. *Op. cit.*, hal. 105.

tersebut membutuhkan kerjasama di antara mereka untuk mengatasi berbagai tantangan global baru. Kategori ketiga, regionalisme lama lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) dan bersifat proteksionis. Sedangkan regionalisme baru lebih cenderung untuk bersifat terbuka (*open regionalism*) dan menyesuaikan dengan ekonomi dunia yang semakin independen.

Kategori keempat, mengacu pada lingkup kegiatan dari kerjasama regional. Regionalisme lama lebih bersifat spesifik pada fokus kegiatannya. Sedangkan regionalisme baru lebih bersifat komprehensif dan multidimensional, yang mana lingkup kegiatannya tidak hanya mencakup satu aspek kerjasama saja tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya yang saling terkait. Kategori terakhir mengacu pada hubungan antar aktor yang terlibat dalam kerjasama kawasan. Regionalisme lama hanya memusatkan perhatiannya pada aktor negara, sedangkan regionalisme baru tidak hanya melibatkan aktor negara tetapi juga non-negara dalam interaksi kawasan.

Menurut T. May Rudy, regionalisme sering dianalisis berdasarkan tingkat kohesi sosial (etnis, ras, bahasa, agama, budaya, sejarah, kesadaran, serta warisan bersama), kohesi ekonomi (pola-pola perdagangan), kohesi politik (tipe-tipe rezim serta ideologi), serta kohesi organisasi (keberadaan institusi regional yang sifatnya formal).⁴¹ Untuk memahami regionalisme dapat melalui proses-proses yang menjadi

⁴¹ T. May Rudy. (2002). *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT Refika Aditama., hal 84.

ciri-ciri berlangsungnya regionalisme. Rudy juga mengemukakan lima proses berlangsungnya regionalisme, yaitu:⁴²

1. Regionalisasi, yaitu merupakan perkembangan suatu integrasi sosial dalam suatu kawasan yang secara tidak langsung merupakan suatu proses interaksi sosial dan ekonomi;
2. Kesadaran dan identitas regional, yang merupakan suatu persepsi bersama (*shared perception*) yang dimiliki oleh komunitas khusus yang didasarkan oleh faktor-faktor internal, sering didefinisikan sebagai suatu kesamaan budaya, sejarah, maupun tradisi agama, juga dapat didefinisikan sebagai bentuk ancaman keamanan maupun tantangan budaya sebagai pengaruh faktor eksternalnya;
3. Kerjasama regional antar negara, merupakan kerjasama yang dibentuk untuk beberapa tujuan tertentu, seperti upaya menghadapi tantangan eksternal serta melakukan koordinasi terhadap kondisi regional dalam lembaga-lembaga internasional maupun dalam perundingan-perundingan internasional, kerjasama regional juga berakibat pada peningkatan stabilitas keamanan, pemahaman terhadap nilai-nilai bersama khususnya pada masalah yang timbul dari saling ketergantungan dalam suatu kawasan;
4. Integrasi regional yang didukung negara, yang mana ditekankan pada integrasi ekonomi regional. Integrasi regional meliputi suatu pengambilan kebijakan khusus oleh pemerintah-pemerintah suatu negara untuk mengurangi

⁴² *Ibid.*

hambatan-hambatan terhadap pergerakan barang, jasa, modal, serta tenaga kerja;

5. Kohesi regional, yaitu penggabungan dari keempat proses sebelumnya yang kemudian menciptakan kepaduan (kohesi) serta konsolidasi suatu unit regional.

Selain itu, terdapat tiga tahap penting proses pertumbuhan regionalisme.⁴³

Tahap pertama yang disebut *pre-regional stage* merupakan saat dimana negara-negara bersepakat untuk membentuk interaksi sosial bersama dalam suatu unit geografis tertentu. Tahap berikutnya merupakan upaya-upaya bersama untuk menciptakan saluran-saluran formal dan informal untuk menggalang kerjasama regional yang tertata dan sistematis. Tahap terakhir yaitu *output* dari proses regionalisasi dimana pembentukan regional bersama, kapasitas institusional, dan legitimasi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, sehingga eksistensi regional mereka diakui secara internasional.

Sebagaimana yang diketahui, kerjasama antar negara dalam suatu kawasan dilakukan dalam rangka untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan adanya kerjasama kawasan tersebut, negara-negara telah sepakat untuk berintegrasi dengan melakukan distribusi kekuasaan di antara mereka demi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Perwita dan Yani, bentuk integrasi negara-negara kawasan terbagi ke dalam dua tingkat, yaitu pertama, integrasi dangkal (*shallow integration*) yang hanya mengacu pada upaya regional untuk mengurangi atau menghapuskan kendala-

⁴³ Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani. *Op. cit.*, hal. 107.

kendala perdagangan, sedangkan kedua, integrasi dalam (*deep integration*) yang bertujuan untuk mencapai kesatuan ekonomi dan fiskal secara menyeluruh (*full economic and monetary union*).⁴⁴

Perwita dan Yani kemudian mengemukakan tiga elemen utama regionalisme,⁴⁵ yaitu elemen pertama, pengalaman kesejarahan masalah-masalah yang bersama yang dihadapi sekelompok negara dalam sebuah lingkungan geografis, yang mana akan mempengaruhi derajat interaksi antar aktor negara di suatu kawasan. Elemen kedua, adanya keterkaitan yang erat antar negara kawasan, yaitu ‘batas’ kawasan dalam interaksi di antara mereka atau dimensi ‘ruang’ (*spatial dimension of regionalism*).

Elemen ketiga, yaitu adanya kebutuhan bagi negara-negara kawasan untuk menciptakan organisasi yang dapat membentuk kerangka legal dan institusional untuk mengatur interaksi di antara mereka serta menyediakan ‘aturan main’ dalam kawasan. Interaksi antar negara dalam kawasan, lagi menurut Perwita dan Yani, terdiri atas empat variabel, yaitu sifat dan tingkat kohesivitas aktor yang akan menentukan tingkat interaksi di antara mereka, sifat komunikasi dalam kawasan, tingkat *power* yang dimiliki aktor kawasan, dan struktur hubungan antar aktor dalam kawasan.⁴⁶

⁴⁴ Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani. *Op. cit.*, hal. 108.

⁴⁵ _____. *Op.cit.*, hal. 107-108

⁴⁶ _____. *Loc. cit.*

RRT dan Korea Utara merupakan negara yang masing-masing mendiami kawasan Asia Timur. Tindakan ataupun kebijakan luar negeri yang dijalankan baik oleh RRT maupun Korea Utara akan berdampak pula pada stabilitas kawasan Asia Timur, khususnya di Semenanjung Korea. Di sisi lain, Semenanjung Korea sejak awal telah dikelilingi oleh negara-negara *capable* nuklir terbesar sehingga sangat rawan akan konflik dan persaingan kepentingan. Dengan demikian, dibutuhkan kerjasama yang berbasis regional untuk menengahi kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga tercipta kestabilan di dalam kawasan Asia Timur, khususnya di Semenanjung Korea.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HUBUNGAN RRT-KOREA UTARA DI SEMENANJUNG KOREA

A. Hubungan RRT-Korea Utara

1. Riwayat Hubungan

Sebelum Semenanjung Korea terbelah menjadi Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) dan Republik Korea (Korea Selatan), wilayah ini pernah dikuasai oleh serangkaian kerajaan yang didirikan oleh pendatang, yang kebanyakan berasal dari RRT. Hubungan antara RRT dan Korea (Korea Utara dan Korea Selatan) telah berlangsung sejak masa lampau, terhitung sejak sekitar 110 tahun sebelum masehi.⁴⁷ Lamanya hubungan yang telah terjalin membuat RRT dan Korea, khususnya Korea Utara, memiliki latarbelakang yang sangat mirip.

RRT sebagai negara dengan peradaban maju selama beribu-ribu tahun menyebarkan Ajaran Budhisme dan Konfusianisme yang kemudian juga ikut dianut oleh penduduk Korea. Ajaran-ajaran tersebut banyak diadopsi sebagai dasar dari karakteristik nasional di kedua Korea. RRT sebagai pelindung Korea menanamkan pengaruh yang signifikan pada hampir seluruh aspek dari masyarakat Korea. Namun demikian, hubungan antara RRT dan Korea harus meregang dengan melemahnya Dinasti Qing (1644-1912). Hadirnya agresi Jepang kemudian mengalahkan RRT

⁴⁷ Leny Wahyura. (2008). Diplomasi Jepang dalam Menghadapi Masalah Penculikan Warga Negara Jepang oleh Korea Utara. *Program Pascasarjana Universitas Indonesia*, 15-93. Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/117251-T%2024963-diplomasi%20jepang-analisis.pdf> pada tanggal 1 Februari 2016.

dalam persaingan pengaruh di Korea melalui Perang Sino-Jepang pada 1894-1895. Tidak hanya berhasil menganeksasi Korea (1910-1945), Jepang juga melakukan penjajahannya di RRT.

Akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, Jepang resmi menyerahkan diri pada sekutu setelah menganeksasi Korea selama 35 tahun (1910-1945). Hal tersebut berarti kesempatan bagi kemerdekaan Korea. Dengan tujuan untuk menyelesaikan proses penyerahan diri Jepang sekaligus berjanji untuk menuntun bangsa Korea menjadi bangsa yang merdeka, sekutu (Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan RRT) memutuskan untuk melakukan pendudukan dan perwalian terhadap Korea.⁴⁸ Hal tersebut pada mulanya disambut baik oleh rakyat Korea karena kemenangan sekutu dianggap dapat melahirkan pemerintahan Korea merdeka yang otonom. Namun, adanya perpecahan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang berubah menjadi Perang Dingin pada akhirnya mendorong terjadinya Perang Korea yang memisahkan kedua Korea hingga saat ini.

Peristiwa Perang Korea menjadi awal kedekatan kembali hubungan diplomatik di antara RRT dan Korea Utara sebagai sebuah negara berdaulat. Secara rinci, RRT dan Korea Utara yang berideologi komunis, melakukan pertukaran pengakuan diplomatik pada 6 Oktober 1949, yaitu ketika Perdana Menteri RRT saat itu, Zhou Enlai, mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Korea Utara, Park Hon-yeong, yang mana menjelaskan keinginan RRT untuk membangun hubungan

⁴⁸ Frassminggi Kamasa. (2016). *Perang Korea: Tragedi Terbelahnya Semenanjung Korea dalam Perang yang Belum Selesai*. Yogyakarta: Narasi., hal. 22-24.

diplomati dengan Korea Utara.⁴⁹ Hingga pada peristiwa Perang Korea (1950-1953), RRT ikut berperang dengan memberikan bantuan bala tentara melawan sekitar 3.000.000 orang untuk mendukung tentara Korea Utara melawan tentara Korea Selatan dan Amerika Serikat di Semenanjung Korea. Terdapat kira-kira 250.000 orang Korea Utara dan 100.000 orang RRT yang tewas dalam konflik Perang Korea ini, yang mana hal tersebut semakin menciptakan ikatan yang kuat antara kedua negara komunis tersebut.⁵⁰

Setelah terjadinya gencatan senjata pada 1953, RRT bersama dengan anggota lain dari Blok Timur yang dikepalai oleh Uni Soviet memasok bantuan ekonomi secara besar-besaran kepada Korea Utara untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Korea Utara.⁵¹ Namun demikian, seiring berjalannya waktu, bantuan dari Uni Soviet terus berkurang. Hal tersebut banyak dilatarbelakangi oleh kondisi internal Uni Soviet, yaitu kematian Josef Stalin, pemimpin komunis Uni Soviet, serta perebutan kepemimpinan Uni Soviet yang berlanjut setelahnya, yang mana mengancam stabilitas Uni Soviet.⁵² Terpilihnya Nikita S. Khrushchev yang kemudian mendesak de-Stalinisasi dan berdamai dengan dunia Barat (Amerika

⁴⁹ Wilson Center. *China-North Korea Relations*. Diakses dari <http://digitalarchive.wilsoncenter.org/collection/115/china-north-korea-relations> pada tanggal 16 Juli 2016.

⁵⁰ Mark Beeson. *Why Does China Continue to Protect North Korea? It Has a Lot Less to do With Communism Than You'd Think*, dimuat pada tanggal 8 Februari 2016. Diakses dari <http://www.independent.co.uk/voices/why-does-china-continue-to-protect-north-korea-it-has-a-lot-less-to-do-with-communism-than--you-d-a6860881.html> pada tanggal 16 Juli 2016.

⁵¹ Shen Zhihua dan Yafeng Xia. *China and the Post-War Reconstruction of North Korea, 1953-1961*, dimuat tanggal 30 Mei 2012. Diakses dari <http://www.wilsoncenter.org/publication/china-and-the-post-war-reconstruction-north-korea-1953-1961> pada tanggal 10 Juli 2016.

⁵² Jae Kyu Park, Byung Chul Koh, dan Tae-Hwan Kwak. *Op. cit.*, hal. 169

Serikat).⁵³ Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan terhadap arah kebijakan komunis dunia dan membuat hubungannya dengan negara komunis lain, seperti RRT dan Korea Utara yang anti Barat meregang.

Dengan melihat kondisi Uni Soviet tersebut, RRT kemudian mengambil peran Uni Soviet di Korea Utara sebagai penyokong utama Korea Utara. Bantuan yang diberikan RRT pada Korea Utara terus meningkat. Tidak hanya berupa dukungan ekonomi, RRT juga memberikan dukungan politik kepada Korea Utara. Begitu banyaknya bantuan yang diberikan oleh RRT terhadap Korea Utara membuat RRT menjadi sekutu yang sangat penting bagi Korea Utara.

Di sisi lain, pasca Perang Korea, RRT semakin menyadari pentingnya posisi strategis Korea Utara, yaitu sebagai *buffer zone* RRT di bagian utara Asia, yang mana memungkinkannya menghalau ancaman kekuatan militer Amerika Serikat yang ditempatkan di Korea Selatan dan Jepang. Dengan demikian, pada 11 Juli 1961, RRT dan Korea Utara secara resmi menandatangani Traktat Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Timbal-Balik (*Treaty of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance*).⁵⁴

Dalam perjanjian tersebut, RRT dan Korea Utara sepakat bahwa kedua belah pihak akan saling memberikan bantuan dalam konflik maupun perang; menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara; serta melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Treaty of Friendship, Cooperation and mutual Assistance Between the People's Republic of China and the Democratic People's Republic of Korea* (1961). *Loc.cit.*

⁵⁵ *Ibid.*

Adanya perjanjian persahabatan ini semakin mengukuhkan hubungan di antara keduanya. Perjanjian persahabatan tersebut masih berlaku hingga saat ini.

RRT saat ini merupakan *partner* dagang terbesar, serta sumber pangan; senjata; dan energi bagi Korea Utara.⁵⁶ RRT juga banyak menanamkan investasinya di Korea Utara. Kini perekonomian Korea Utara menjadi bergantung sepenuhnya pada RRT, yang mana 90% pasokan minyak, 80% barang jadi, dan 45% bahan pangan Korea Utara merupakan hasil sumbangan dari RRT.⁵⁷ Bantuan yang diberikan RRT tentu saja merupakan bantuan terbesar bagi rezim komunis yang berkuasa di Korea Utara, yang mana dalam sejarahnya banyak mendapatkan sanksi internasional.

Namun demikian, satu-satunya hal yang menjadi penghalang dalam hubungan RRT-Korea Utara adalah uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Tindakan Korea Utara tersebut tidak hanya memprovokasi negara-negara di sekitarnya, tetapi juga dunia internasional. Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan dunia mengambil tindakan, yaitu membangun tekanan militer di Semenanjung Korea untuk mencegah Korea Utara melakukan tindakan *preemptive*.⁵⁸ Namun di sisi lain, pengembangan nuklir Korea Utara juga dapat membatasi ruang

⁵⁶ Eleanor Albert. *The China-North Korea Relationship*, dimuat tanggal 8 Februari 2016. Diakses dari <http://www.cfr.org/china/china-north-korea-relationship/p11097> pada tanggal 10 Juli 2016.

⁵⁷ Matthias von Hein. *Loc. cit.*

⁵⁸ Shen Dingli. (2006). *North Korea's Strategic Significance to China*. World Security Institute. China Security, Autumn 2006. 19-34. Diakses dari <http://www.issuelab.org/resources/434/434.pdf> pada tanggal 13 November 2016., hal. 20.

gerak militer Amerika Serikat di Semenanjung Korea, yang mana hal tersebut merupakan tugasnya sebagai *buffer zone* RRT.⁵⁹

RRT di sisi lain, tidak dapat mengabaikan nilai strategis Korea Utara, namun juga tidak dapat mengabaikan tanggapan dunia internasional. Dengan demikian, RRT menanggapi pengembangan nuklir Korea Utara dengan menyetujui resolusi dari DK PBB untuk memberikan sanksi terhadap Korea Utara, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara (2006-2013)

Resolusi DK PBB	Bentuk sanksi yang dibebankan pada Korea Utara
Resolusi 1718 pada tahun 2006	Membatasi jangkauan impor dan ekspor untuk Korea Utara (membatasi perdagangan Korea Utara) dan mengenakan pembekuan aset serta larangan kunjungan atas orang-orang yang terkait dalam program nuklir tersebut. Resolusi ini juga melarang impor dari barang mewah terhadap Korea Utara. Persenjataan skala besar, teknologi nuklir, dan segala hal yang berkaitan dengan pelatihan atas pengembangan persenjataan nuklir dilarang untuk dipasok kepada Korea Utara. Semua negara (kecuali RRT) bekerjasama dalam menginspeksi muatan yang dicurigai sebagai perdagangan nuklir, bahan kimia, atau senjata biologis masuk ke Korea Utara.
Resolusi 1874 pada tahun 2009	Memperkuat sanksi sebelumnya, yang mana mengembangkan embargo persenjataan dengan melarang semua impor dan ekspor senjata, terkecuali persenjataan kecil dan menetapkan bahwa negara harus melapor pada Dewan Keamanan sebelum menjual senjatanya pada Korea Utara. Negara anggota diberikan kuasa untuk mencegat, menginspeksi serta menghancurkan muatan apapun yang ditemui di dalam teritorinya yang jalurnya berasal atau bertujuan ke Korea Utara, yang mana dicurigai melanggar embargo persenjataan. Bantuan keuangan untuk Korea Utara juga dibatasi, transfer keuangan yang dapat digunakan untuk membantu pengembangan persenjataan Korea Utara dilarang keras.
Resolusi 2087 pada tahun 2013	Memperkuat sanksi-sanksi sebelumnya. Tindakan termasuk memperjelas hak negara untuk menyita dan menghancurkan material yang dicurigai menuju ke atau dari Korea Utara yang bertujuan mengembangkan senjata ataupun penelitian. Mempertegas kembali larangan bepergian atas orang-orang yang dicurigai terkait dengan program nuklir Korea Utara.

⁵⁹ *Ibid.*

Resolusi 2094 pada tahun 2013	Sanksi keuangan baru ditargetkan untuk memblokir akses dari rezim Kim untuk menumpuk transfer tunai, mencegah aktivitas terlarang Korea Utara, dan membatasi hubungan Korea Utara pada sistem perbankan internasional. Resolusi ini mendesak negara untuk menggunakan petunjuk dari <i>Financial Action Task Force</i> untuk membatasi akses Korea Utara untuk mengambil biaya yang dapat dipergunakannya untuk tujuan-tujuan proliferasi senjatanya. Selain memperkuat sanksi yang telah ada, memperluas jangkauan dari negara-negara untuk memaksa dan memantau pelaksanaan sanksi serta pemindahan material-material ke atau dari Korea Utara melalui teritori mereka.
-------------------------------	---

Sumber: *Arms Control Association*, 14 Maret 2013⁶⁰

Tindakan RRT tersebut mengubah sifat hubungan bilateralnya dengan Korea Utara, yaitu dari diplomasi menjadi hukuman. Pengembangan senjata nuklir Korea Utara di satu sisi memang dapat menghalau serangan dari luar, namun di sisi lain juga berpotensi memicu penurunan stabilitas di Semenanjung Korea. Sedangkan bagi RRT, penurunan stabilitas tersebut sangat berdampak pada pembangunan ekonominya. Oleh karena itu, RRT perlu bersikap sebagaimana perannya sebagai *'responsible stakeholder'* Korea Utara di depan komunitas dunia internasional.⁶¹

Dengan demikian, RRT mendukung resolusi 1718, resolusi 1874, dan resolusi 2094 dari Dewan Keamanan PBB, sebagaimana yang tercantum pada tabel tersebut.⁶² Namun demikian, di sisi lain, RRT tetap mempertahankan Korea Utara. Hal tersebut jelas terlihat dalam resolusi 1718, RRT menyetujuinya hanya setelah adanya revisi tentang persyaratan untuk pemberian sanksi keras ekonomi di luar penargetan barang mewah dihapus.⁶³

⁶⁰ Elizabeth Philipp. *UN Security Council Resolutions on North Korea*, dimuat pada 14 Maret 2013. Diakses dari <https://www.armscontrol.org/factsheets/UN-Security-Council-Resolutions-on-North-Korea#top> pada tanggal 2 Agustus 2016.

⁶¹ Shen Dingli. *Op. cit.*, hal. 21.

⁶² Eleanor Albert. *Loc. cit*

⁶³ *Ibid.*

Sebagaimana yang dikutip dalam tabel tersebut di atas, resolusi-resolusi tersebut juga menyetujui sanksi lebih jauh, seperti pemeriksaan atas dasar kecurigaan terhadap adanya aktivitas perdagangan nuklir ataupun misil. Namun RRT sebagai sekutu terdekat Korea Utara tidak melakukan pemeriksaan tersebut dan terus mendukung rezim Korea Utara.⁶⁴ Pada Februari 2013, Korea Utara berhasil meluncurkan satelit dan melakukan uji coba nuklirnya. RRT yang masih memperdulikan Korea Utara kemudian mengundang duta besar Korea Utara untuk membicarakan tentang himbauan denuklirisasi, pengimplementasian sanksi perdagangan baru, dan pengurangan penyediaan energi untuk Korea Utara.

Keberlangsungan hubungan baik antara RRT dan Korea Utara dapat dilihat pada kunjungan kenegaraan yang secara berkala dilakukan oleh keduanya. Tidak hanya itu, tingkat perdagangan antara RRT-Korea Utara terus mengalami peningkatan, mengesampingkan masalah nuklir Korea Utara. Pada 2014, perdagangan di antara kedua negara ini mencapai \$6.86 milyar, yang mana lebih tinggi sekitar \$500 juta dari tahun 2000.⁶⁵ Dengan demikian, RRT berperan sangat besar dalam menyokong perekonomian Korea Utara di tengah gencarnya kecaman dan hukuman internasional atas uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara.

Sebelum RRT menyetujui pemberian sanksi pada Korea Utara 2006 silam, adanya program nuklir Korea Utara tidak mempengaruhi hubungannya dengan RRT. Ketika Korea Utara meluncurkan misil Taepodong-1 pada tahun 1998 dan menuai

⁶⁴ Elizabeth Philipp. *Loc. cit.*

⁶⁵ Eleanor Albert. *Loc. cit*

protes serta sanksi internasional, hubungan RRT dan Korea Utara tetap baik.⁶⁶ Pada tahun 2002 ketika Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklirnya, RRT bekerjasama dengan negara lain dalam pertemuan multilateral yang melibatkan enam pihak atau disebut *Six Party Talk* (RRT, Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang), namun dalam pertemuan tersebut RRT sama sekali tidak menunjukkan itikad apapun untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara.⁶⁷

Saat ini, RRT menjadi penyokong utama Korea Utara dalam hal ekonomi maupun bantuan pangan. Hal tersebut bermula sejak semua negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan memperkecil secara signifikan bantuan yang diberikan kepada Korea Utara seiring dengan gagalnya *Six Party Talk* pada 2009.⁶⁸ Padahal sejak 1995, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat telah memasok lebih dari 75% bantuan makanan pada Korea Utara.

Di sisi lain, adanya masalah penyitaan terhadap kapal-kapal nelayan RRT oleh Korea Utara juga ikut memperburuk hubungan di antara keduanya. Pada Mei 2013, Konselor RRT untuk Korea Utara, Jiang Yaxian, mengatakan bahwa Korea Utara telah menangkap kapal pribadi milik rakyat RRT dari sebelah utara kota Dalian di perairan antara RRT dan Semenanjung Korea.⁶⁹ Korea Utara meminta tebusan

⁶⁶ Mu Chunsan. *Why, China-North Korea Relations Can't Be Broken*, dimuat pada tanggal 10 Maret 2016. Diakses dari <http://thediplomat.com/2016/03/why-china-north-korea-relations-can't-be-broken/> pada tanggal 10 Juli 2016.

⁶⁷ Devi Fitria. *Loc. cit.*

⁶⁸ Eleanor Albert. *Loc. cit.*

⁶⁹ Adam Jourdan. *China Seeks Release of Fishing Boat Seized By North Korea*, dimuat pada tanggal 19 Mei 2013. Diakses dari <http://mobile.reuters.com/article/idUSBRE94I09620130519> pada tanggal 12 Juli 2016.

sebanyak 600.000 *yuan* untuk pengembalian kapal beserta ke 16 awaknya.⁷⁰ Ketegangan semakin mengerucut di antara RRT dan Korea Utara ketika beberapa bank di RRT membekukan bank valuta asing utama Korea Utara di tengah frustrasi RRT menghadapi program senjata nuklir dan misil balistik Korea Utara.

Namun demikian, RRT menghalangi aksi punitif internasional terhadap Korea Utara yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. RRT mengkritik laporan PBB pada Februari 2014 yang membahas secara rinci pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara (penyiksaan, kelaparan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan) dan RRT juga mengupayakan untuk menghalangi sidang Dewan Keamanan PBB yang diadakan pada Desember 2014 dan 2015 yang membahas status hak asasi di Korea Utara.⁷¹ Tindakan RRT tersebut bertolakbelakang dengan apa yang dilakukannya pada Maret 2010. RRT pada saat itu menolak untuk mengambil sikap terhadap Korea Utara, meskipun terdapat bukti jelas yang menunjukkan keterlibatan Korea Utara dalam peristiwa penenggelaman kapal laut Korea Selatan.

2. Kesamaan Ideologi

RRT dan Korea Utara, sama-sama merupakan negara yang pernah terjajah oleh bangsa lain. Mengalami sakitnya menjadi bangsa yang terjajah membawa kedua negara ini pada perjuangan demi perjuangan untuk merebut kebebasan mereka dari

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

tangan para penjajah. Komunisme sebagai ideologi perjuangan menarik perhatian RRT begitu pula Korea Utara.

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, komunisme adalah sebuah ideologi yang menghendaki penghapusan pranata kaum kapitalis serta berkeinginan membentuk masyarakat kolektif agar tanah dan modal yang dimiliki secara sosial dan pertentangan kelas serta sifat kekuatan menindas dari negara tidak berlangsung lagi.⁷² Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambilalihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. Pada prinsipnya semua direpresentasikan sebagai milik rakyat dan karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai negara demi kemakmuran rakyat secara merata.

Berdasarkan sejarahnya, komunisme adalah sebuah filsafat ekonomi-politik yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada tahun 1848 dalam tulisannya yang berjudul "*The Communist Manifesto*", Marx dan Engels mengkritik kapitalisme yang menciptakan sistem kelas sosial, sehingga menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap kaum buruh (proletar).⁷³ Marx dan Engels menjelaskan, bahwa ketika kaum proletar yang dieksploitasi sadar akan hal tersebut, maka akan terjadi konflik kelas yang akan terselesaikan lewat revolusi perjuangan dimana kaum proletar akan bangkit melawan kaum borjuis (pemilik produksi), dan akhirnya

⁷² Jack C. Plano dan Roy Olton. *Op.cit.*, hal. 36.

⁷³ Communism and Computer Ethics. *History and Background of Communism*. Diakses dari <http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs201/projects/communis-computing-china/> pada tanggal 16 Juli 2015.

terbentuklah masyarakat komunis.⁷⁴ Dalam masyarakat komunis semua kepemilikan pribadi akan dihapuskan, yang artinya semua produksi akan menjadi milik masyarakat.

Pada abad ke-19, komunisme mulai berkembang di Rusia (Uni Soviet). Pada tahun 1917, kaum Bolsheviks berhasil meruntuhkan kekuatan militer dan sosial Rusia dan mengambil kekuasaan lewat gerakan Revolusi Oktober. Ideologi komunisme kemudian berkembang dan telah diikuti oleh beberapa negara, seperti RRT. Tidak seperti perkembangan komunis di RRT yang memperoleh sendiri kekuasaannya, Korea Utara mendapatkan kekuasaannya lewat pendudukan rezim komunis yang dilakukan oleh Uni Soviet pada periode antara tahun 1945-1949.⁷⁵

Partai Komunis di RRT dan Korea Utara mulai berkembang pada waktu yang hampir bersamaan. Walaupun demikian, Partai Komunis Cina (RRT) dan Partai Buruh Korea (Korea Utara) memiliki cara yang berbeda dalam meraih kekuasaannya. Partai Komunis Cina dibentuk pada tahun 1921 dan dipimpin oleh Mao Zedong pada 1927, Mao Zedong kemudian memimpin revolusi dan Partai Komunis Cina memperoleh kekuasaannya pada tahun 1947.⁷⁶ Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong mendeklarasikan dataran Cina sebagai Republik Rakyat Cina (Republik Rakyat Tiongkok). Sebaliknya perkembangan ideologi komunis di Korea Utara baru terjadi pada akhir Perang Dunia II (1945), yaitu ketika Uni Soviet menduduki Korea Utara

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Jack C. Plano dan Roy Olton. *Op.cit.*, hal. 37.

⁷⁶ Communism and Computer Ethics. *Communism in China*. Diakses dari <http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs201/projects/communis-computing-china/> pada tanggal 14 Juli 2015.

dan segera mengembangkan rezim komunis di Korea Utara. Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Il Sung kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Republik Demokratik Rakyat Korea pada 1948.

Korea Utara pada awal kemerdekaannya masih berada di bawah perlindungan militer Uni Soviet sehingga tidak memiliki kendali dan diarahkan untuk bertindak cepat melaksanakan inti kebijakan-kebijakan sosialis.⁷⁷ Lain halnya dengan RRT pada masa awal kemerdekaannya. RRT pada saat itu harus mempersatukan kelas borjuis dan proletar, yaitu dengan cara menasionalisasikan industri dan mengolektif agrikultur secara perlahan-lahan, sedangkan untuk memulihkan perekonomiannya, RRT mengubah firma swasta menjadi usaha milik negara dan perusahaan swasta dikenai pajak yang tinggi dan akhirnya terbeli dengan menetapkan bayaran yang diminati pada semakin bertambahnya tarif nominal kepada pemilik aslinya.⁷⁸ Mao Zedong secara radikal menghapuskan segala kepemilikan pribadi dan mensentralisasikan hampir semua bagian dari industri dan agrikultur.

Hingga pada tahun 1970, Partai Komunis Cina dan Partai Buruh Korea mengadopsi prinsip Marxisme-Leninisme, yaitu penafsiran teoritis dan penerapan praktek doktrin Marxis yang disumbangkan pada ideologi komunisme oleh pemimpin revolusioner Rusia, Vladimir Lyich Lenin.⁷⁹ Bentuk adopsi Marxisme-Leninisme yang dilakukan oleh kedua negara, yaitu pengaplikasian demokrasi terpusat

⁷⁷ James Graham. *Comparison of Chinese and North Korean Communism Up To The 1980s*. Diakses dari http://www.onthisday.com/asia/chinese_korean_communism.php pada tanggal 16 Juli 2016.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Jack C. Plano dan Roy Olton. *Op.cit.*, hal. 39.

(*democratic centralism*), yang berarti bahwa negara tidak hanya menguasai produksi tetapi juga menguasai perencanaan ekonomi, investasi, dan distribusi.⁸⁰ RRT di bawah kepemimpinan Mao Zedong dan begitu pula Korea Utara di bawah kepemimpinan dinasti Kim (Kim Il Sung, Kim Jong Il, dan Kim Jong Un) merupakan negara yang tertutup dari dunia luar.

Baik Mao Zedong maupun Kim Il Sung memiliki versi sendiri dalam mengadaptasi Marxisme-Leninisme sehingga sesuai dengan kondisi yang dihadapi di negaranya masing-masing. Di RRT, Mao menafsirkan dan menerapkan Marxisme-Leninisme dalam doktrin komunis yang disebut ‘maoisme’, yang menekankan pada kemurnian ideologi komunis, perjuangan kelas, dan pencapaian tujuan revolusioner terlebih dahulu sebelum mewujudkan keahlian teknologi dan kemakmuran materi (ekonomi), sehingga RRT bebas dari pengaruh kapitalis dan revisionis.⁸¹ Diketuskannya program pembangunan Lompatan Jauh ke Depan (*Great Leap Forward*) dan pembentukan *commune* pada tahun 1958, yaitu unit primer organisasi sosial masyarakat RRT komunis yang dirancang untuk memaksimalkan produksi melalui reorganisasi kerja dan pola hidup masyarakat; serta peristiwa Revolusi Budaya (*Cultural Revolution*) yang dimulai pada tahun 1967, merupakan kebijakan Mao yang ingin mengamankan kekuasaan dengan mengusahkan agar RRT lebih

⁸⁰ James Graham. *Loc. cit.*

⁸¹ Jack C. Plano dan Roy Olton. *Op. cit.*, hal. 356.

akrab dengan komunisme.⁸² Dengan demikian, RRT pada masa Mao Zedong menjadi negara yang tertutup dari dunia luar, sehingga di juluki sebagai negara tirai bambu.

RRT tidak hanya menerapkan komunisme sebagai ideologi, tetapi juga sebagai dasar dalam bernegara dan melakukan hubungan dengan negara lain.⁸³ Dalam menjalankan sistem pemerintahannya yang parlementer, RRT berberda dari negara lain. Sistem politik dan pembagian kekuasaan di RRT melalui sistem partai tunggal, yang mana kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres Rakyat Nasional yang didominasi oleh Partai Komunis Cina; kekuasaan eksekutif dipegang oleh ketua partai, sedangkan penyelenggara pemerintahan tertinggi yang setingkat perdana menteri dilakukan oleh sekretaris jendral partai; dan terakhir, kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat oleh pengadilan rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung dan pengadilan rakyat tersebut bertanggungjawab kepada Kongres Rakyat Nasional di setiap tingkatan.⁸⁴

Hampir sama halnya dengan Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Il Sung. Di Korea Utara, Kim Il Sung mempraktekkan sebuah ideologi yang disebut '*juche*', yaitu sikap mandiri dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa bergantung pada negara lain.⁸⁵ *Juche* memiliki tiga dasar fundamental, yaitu merdeka dalam berpolitik (*chaju*), swasembada ekonomi (*charip*), dan mandiri dalam pertahanan

⁸² Jack C. Plano dan Roy Olton. *Op. cit.*, hal. 40.

⁸³ Djato Prihantono. (2013). *Perang Korea: Konflik Dua Saudara*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo., hal 98.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Alfina Farmaritia Wicahyani. *Op. cit.*, hal. 22.

(*chawi*).⁸⁶ Ideologi *juche* juga memberikan doktrin pada rakyat Korea Utara bahwa orang korea adalah penguasa revolusi Korea dan bahwa Korea Utara adalah negara terhebat, serta tidak ada yang bisa melebihi Korea Utara.

Dikelilingi oleh negara-negara berkekuatan besar dan memiliki sejarah dalam melakukan invasi ke Korea Utara membuat Kim Il Sung tidak punya pilihan, selain memperkuat internal Korea Utara sekuat mungkin. Dalam rangka memperkuat internal Korea Utara sejalan dengan ideologi *juche* tersebut, Korea Utara menutup diri dari dunia luar, baik dari segi ekonomi, politik maupun budaya. Tidak hanya itu, Kim Il Sung juga memperkuat militernya demi menunjang rezim pemerintahannya.

Hal tersebut tergambar dalam Empat Garis Besar Militer Korea Utara yang diputuskan oleh Kim Il Sung, yaitu:⁸⁷

- 1) Mempersenjatai semua warga negara;
- 2) Memperkuat seluruh negeri;
- 3) Melatih semua angkatan darat menjadi *cadre army* (kader tentara);
- 4) Melakukan modernisasi semua angkatan darat, doktrin, dan taktik di bawah prinsip kepercayaan diri terhadap pertahanan nasional.

Untuk menunjang kekuatan militer konvensional yang lemah, Korea Utara kemudian berusaha untuk mengembangkan tenaga nuklir. Pada masa Kim Il Sung, program nuklir Korea Utara bertujuan sebagai strategi penyeimbang terhadap persenjataan Korea Selatan; menambah kewibawaan dan pengaruh Korea Utara

⁸⁶ Djato Prihantono. *Op. cit.*, hal. 99.

⁸⁷ Alfina Farmaritia Wicahyani. *Op. cit.*, hal. 23.

dalam hubungan antar negara di dunia; dan sebagai sarana pemerasan agar mendapatkan keuntungan dari Korea Selatan.⁸⁸ Hal tersebut sebagaimana yang katakana oleh Prilla Marsingga bahwa senjata nuklir lebih berguna dalam proses negosiasi, yaitu sebagai alat ancaman yang mempunyai kekuatan strategis daripada dipergunakan secara militer yang berdampak menghancurkan.⁸⁹

Dalam sistem pemerintahannya, Korea Utara memiliki sistem pemerintahan terpusat. Dalam hal ini, Kim Il Sung sebagai presiden abadi, sedangkan Kim Jong Il sebagai pimpinan tertinggi. Adapun pembagian kekuasaan di Korea Utara, yaitu eksekutif sebagai pelaksana undang-undang yang dipegang oleh Perdana Menteri, legislatif sebagai pembuat undang-undang yang dipegang oleh Ketua Majelis Rakyat Tertinggi, dan yudikatif sebagai pengawas undang-undang dipegang oleh para hakim agung yang dipilih oleh Majelis Rakyat Tertinggi.⁹⁰ Korea Utara juga menganut sistem monopartai yang hanya memiliki satu partai, yaitu Front Demokratik untuk Reunifikasi Tanah dan Air yang merupakan koalisi dari Partai Buruh Korea dan dua partai lainnya, Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois.⁹¹ Partai-partai tersebut kemudian akan menempatkan anggotanya pada posisi pemerintahan di Majelis Tertinggi Rakyat.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Prilla Marsingga. Desember 2014. Proliferasi Nuklir Korea Utara: Penangkalan dan Diplomasi Kekerasan. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (JIPSI). Vol. 4. No.II. 1-16. Diakses dari <http://abstrak.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/download/160/163> pada tanggal 13 November 2016., hal. 3.

⁹⁰ Djato Prihantono. *Op. cit.*, hal. 99.

⁹¹ *Ibid.*

Pada masa pemerintahan Kim Jong Il (1997-2011) kebijakannya difokuskan pada kapabilitas militer lebih daripada memperbaiki perekonomian negaranya.⁹² Hal tersebut berbanding terbalik dengan RRT yang mulai melakukan liberalisasi pada sektor perekonomiannya. Dalam masa pemerintahan Kim Jong Il, Korea Utara tidak hanya tetap mengembangkan dan melakukan uji coba senjata nuklirnya, namun juga mengundurkan diri dari NPT dan menolak segala intervensi baik dari IAEA maupun PBB pada tahun 2002, yang mana hal tersebut memicu ketegangan di Semenanjung Korea.⁹³ Korea Utara juga menarik diri dari pertemuan multilateral *Six Party Talk* pada 2009.

Setelah wafatnya Kim Jong Il pada tahun 2011, Kim Jong Un kemudian menggantikan posisi ayahnya. Korea Utara di bawah pemerintahan Kim Jong Un tetap melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat agresif, yaitu meneruskan misi dan pola yang dilakukan pendahulunya sebagai ciri khas yang menjadi tradisi Korea Utara dalam bernegosiasi diplomatik.⁹⁴ Hal tersebut dilakukan untuk membuat Korea Utara dapat memenangkan kesepakatan-kesepakatan politik ekonomi mereka yang dituntut melalui kepemilikan nuklir untuk memenangkan *bargaining position*. Dengan demikian, pengembangan nuklir Korea Utara ditujukan sebagai jaminan akan kelangsungan rezim komunis di Korea Utara, sebagai instrument diplomasi untuk mendapatkan bantuan ekonomi sekaligus meraih keuntungan melalui penjualan teknologi misil, serta sebagai langkah untuk memperkuat keamanan Korea Utara,

⁹² Prilla Marsingga. *Op. cit.*, hal. 7.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 15.

yang kemudian memungkinkannya untuk menghalau kekuatan pengaruh negara-negara luar, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat.⁹⁵

Penerapan demokrasi terpusat dan sejarah dari kedua negara, RRT dan Korea Utara, lekat akan despotisme (tirani). Hal tersebut meperkenankan pemimpin RRT, yaitu Mao Zedong dan pemimpin Korea Utara, yaitu Kim Il Sung, Kim Jongn Il, dan Kim Jong Un untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan mereka dan menciptakan pengkultusan pribadi yang terpusat pada diri mereka sendiri.⁹⁶ Pada Mao Zedong, pengkultusan tersebut dapat dilihat dalam peristiwa Revolusi Budaya pada tahun 1967 hingga 1970-an, yang mana bertujuan untuk membangkitkan kembali kemurnian revolusi serta tujuan ideologi. Menurut kaum Maois, Revolusi Kebudayaan merupakan sebuah gerakan massa revolusioner kaum proletariat terhadap kebangkitan kapitalisme dan materialisme gaya Barat dan Soviet, yang mana pertentangan kekuatan yang sebenarnya bukan antara komunisme dan kapitalisme tetapi antara kaum revolusioner usia senja dengan generasi penerus kaum birokrat dan teknokrat.⁹⁷

Hampir sama halnya dengan pengkultusan yang dilakukan oleh Mao Zedong di RRT, pengkultusan oleh Kim Il Sung ditanamkan lebih kuat dan radikal pada masyarakat Korea Utara. Pengkultusan atas diri Kim Il Sung dimulai dari

⁹⁵ Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri. Juni 2010. *Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional*. SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional. Vol. 7. No. 2. 1-19. Diakses dari <http://www.unwahas.ac.id/publikasiilmiah/index.php/SPEKTRUM/article/download/483/605> pada tanggal 13 November 2016., hal. 1.

⁹⁶ James Graham. *Loc. cit.*

⁹⁷ Jack C. Plano dan Roy Olton. *Op. cit.*, hal. 356.

pengkultusan pada keluarganya, yaitu ibu Kim Il Sung, Kang Ban-suk, yang diberi gelar sebagai '*Mother of Korea*', tidak hanya itu Kim Il Sung juga melakukan manipulasi terhadap sejarah, media massa, serta sistem pendidikan di Korea Utara dan juga menempatkan dirinya sebagai '*role model*' untuk semua kalangan usia di Korea Utara.⁹⁸ Pengkultusan Kim Il Sung tersebut kemudian diteruskan oleh penerusnya, yaitu Kim Jong-il dan Kim Jong-un. Kuatnya pengkultusan yang dilakukan, menyebabkan Mao Zedong dan Kim Il Sung mudah untuk mendominasi politik dan memutarbalikkan komunisme di masing-masing negara, RRT dan Korea Utara.

Baik RRT maupun Korea Utara melaksanakan perencanaan kebijakan ekonomi secara serampangan, sehingga selama beberapa dekade kedua negara tersebut menderita kemiskinan dan ketidakefisienan hasil produksi. Sebagaimana dengan RRT, Korea Utara setelah terlepas dari pendudukan Uni Soviet juga ikut melaksanakan kebijakan yang mirip dengan RRT untuk membangun komunis ideal mereka sendiri. Sebagaimana dengan 'rencana lima tahun' dari RRT, Korea Utara juga mengumumkan rencana tujuh tahunnya pada 1961 dan rencana enam tahun pada 1976.⁹⁹ Agrikultur Korea Utara juga telah dikolektif sebagaimana dengan yang dilakukan oleh sekutunya RRT. Selain itu, sebagaimana dengan Mao Zedong,

⁹⁸ James Graham. *Loc. cit.*

⁹⁹ Yubo Jiang. *North Korea and China: The Differentiation of Socialism*. Diakses dari http://econc10.bu.edu/economic_systems/Country_comparisons/China_north_korea.htm pada tanggal 16 Juli 2016.

pemimpin Korea Utara, Kim Il Sung, juga percaya bahwa agrikultur dan produksi hanya dapat dicapai dengan memberlakukan kebijakan kolektifisme.¹⁰⁰

Komunisme di RRT dan Korea Utara mulai mengalami perbedaan secara signifikan pada tahun 1970. Pada tahun 1971, seiring dengan pertentangan Sino-Soviet, RRT mengumumkan keinginannya untuk menormalisasikan hubungan luar negerinya. Perubahan ekonomi terjadi secara bertahap dan hanya sebagai modal untuk pemulihan dari kehancuran Revolusi Kebudayaan, yang mana hal ini terjadi hingga kematian Mao Zedong dan bangkitnya kekuasaan Deng Xioping.¹⁰¹ Reformasi ekonomi Deng Xioping pada mulanya mencakup reformasi terhadap gaya pasar, *de-collectivisation*, dan penerimaan investasi luar negeri. Reformasi ekonomi pertama berhasil dilakukan dengan keefisienan dalam agrikultur meningkat dengan cepat di tahun-tahun berikutnya, yang mana hal ini mengubah komunisme RRT, dimana Marxisme-Leninisme tidak lagi cocok dalam menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, dan politik di dunia.¹⁰²

Reformasi yang terjadi di RRT tersebut dicerca oleh kaum komunis di Korea Utara maupun di seluruh dunia. Reformasi Deng Xioping membuat komunisme di RRT hanya sebatas nama saja dan menciptakan perpecahan yang sangat kentara dengan komunisme yang berkembang di Korea Utara. Partai Buruh Korea pernah membuat beberapa upaya terbatas untuk menarik investasi dari luar negeri, namun hanya memberikan sedikit hasil. Oleh karena itu, Korea Utara

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ James Graham. *Loc. cit.*

¹⁰² *Ibid.*

memutuskan untuk meyakini bahwa *juche* adalah bentuk ideologi yang cocok untuk membangun Korea Utara. Ideologi *juche* masih dipegang oleh Korea Utara hingga saat ini.

Kedekatan geografis kedua negara membuatnya berbagi sejarah dan ideologi yang sama. Dengan demikian, sangat kecilnya jarak di antara kedua negara ini membuat Korea Utara dan RRT saling mempengaruhi satu sama lain. Korea Utara banyak menirukan perubahan kebijakan ataupun inovasi yang dilakukan oleh RRT, seperti gerakan Kuda Terbang Korea Utara hampir sebanding dengan gerakan Lompatan Jauh ke Depan RRT dan beberapa elemen dari pengkolektifan Korea Utara ditiru oleh RRT.¹⁰³ Sejak terjadinya Perang Korea, RRT selalu mendukung komunisme Korea Utara, walaupun reformasi Deng Xioping merubah komunisme RRT dan terlihat sangat bertentangan dengan ideologi *juche* Korea Utara.

B. Semenanjung Korea

1. Lingkup Semenanjung Korea

Semenanjung Korea merupakan sebuah semenanjung yang terletak di Asia Timur, tepatnya di sebelah timur Laut Cina. Semenanjung Korea membentang ke selatan daratan Benua Asia, kira-kira sepanjang 1,100 km (683 mil). Wilayah Semenanjung Korea mencakup wilayah Korea Utara dan Korea Selatan, yang mana dikelilingi oleh laut di ketiga sisinya, yaitu Laut Jepang (Laut Timur); Laut Kuning;

¹⁰³ *Ibid.*

Selat Korea; Selat Jeju; dan Teluk Korea.¹⁰⁴ Berdasarkan letak geografisnya, Semenanjung Korea berbatasan dengan Rusia dan RRT di bagian utara, Laut Kuning di sebelah barat, Laut Jepang di sebelah timur, serta Laut Cina Timur dan Selat Korea di sebelah selatan. Secara lebih jelas, peta Semenanjung Korea dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Peta Semenanjung Korea
Sumber: www.worldatlas.com¹⁰⁵

Semenanjung Korea memiliki luas wilayah hanya sekitar 223.170 km² jika dibandingkan dengan daratan Cina (RRT) yang memiliki luas 9. 671.018 km², sehingga luas Semenanjung Korea hanya 1/40 luas RRT.¹⁰⁶ Sebagaimana yang diketahui, Semenanjung Korea berbatasan langsung dengan RRT. Dengan perbandingan luas dari kedua wilayah tersebut, disertai dengan letak keduanya yang berbatasan secara langsung, membuat RRT dan Semenanjung Korea saling

¹⁰⁴ Worldatlas. *Korean Peninsula Map, Map of North and South Korea, Korea Information and Facts*. Diakses dari <http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/koreanpn.htm>, pada tanggal 11 Juli 2016.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Djato Prihantono. *Op. cit.*, hal 2.

mempengaruhi satu sama lain dalam banyak hal, seperti budaya, sosial, politik, maupun keamanan. Peristiwa Perang Korea merupakan bukti nyata yang melibatkan RRT dan kedua Korea, Korea Utara dan Korea Selatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Semenanjung Korea merupakan wilayah yang strategis, karena dapat menjadi salah satu ‘pintu masuk’ bagi negara-negara lain jika ingin menguasai Kawasan Asia. Posisi geografis Semenanjung Korea telah menarik negara-negara besar untuk memperebutkan wilayah ini demi kepentingan geopolitik mereka.¹⁰⁷ Berdasarkan sejarahnya, wilayah Semenanjung Korea merupakan satu wilayah yang awalnya dikuasai oleh Dinasti Joseon.¹⁰⁸ Namun, Jepang kemudian dengan paksa mengambil alih Joseon setelah mengalahkan RRT dan Kekaisaran Rusia melalui perang pada saat itu, sehingga Jepang resmi menganeksasi Korea pada tahun 1910-1945.¹⁰⁹ Setelah terbebas dari Jepang, Korea kembali dikuasai oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Akhirnya, pada 1950 terjadi Perang Korea yang membelah wilayah Semenanjung Korea menjadi dua negara, yaitu Republik Demokratik Rakyat Korea di bagian utara dan Republik Korea di bagian selatan.

Semenanjung Korea dikelilingi oleh lima negara dengan kekuatan militer terbesar, yaitu RRT, Rusia, Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat serta dikelilingi oleh lima negara *capable* nuklir terbesar, yaitu Rusia, RRT, Korea Utara,

¹⁰⁷ Pramod Sedhain. *Geopolitical Significant of the Korean Peninsula*, dimuat pada tahun 2015. Diakses dari <http://thedailyjournalist.com/the-historian/geopolitical-significant-of-the-korean-peninsula/> pada tanggal 11 Juli 2016.

¹⁰⁸ Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea, edisi 2012. *Korea: Dulu dan Sekarang*, 1-286., hal 29. Diakses dari http://www.korea.net/koreanet/fileDownload?fileUrl=/content/PDF/general/2012_facts_indonesian.pdf pada tanggal 23 Maret 2016.

¹⁰⁹ Frassminggi Kamasa. *Op. cit.*, hal 5-9.

Jepang dan Amerika Serikat.¹¹⁰ Tidak hanya itu Semenanjung Korea juga dikelilingi oleh tiga negara pemegang hak veto yang merupakan anggota tetap di Dewan Keamanan PBB, yaitu RRT, Rusia, dan Amerika Serikat. Dikelilingi oleh negara-negara berpengaruh dengan kepemilikan nuklirnya membuat Semenanjung Korea menjadi salah satu zona terpanas di dunia.

2. Dinamika Semenanjung Korea

Pada Akhir abad ke-19, Korea adalah wilayah perebutan antara RRT, Rusia, dan Jepang. Pada tahun 1876, Jepang dan Korea mulai membentuk hubungan diplomatik di bawah desakan Jepang dan memulai perdagangan di antara kedua negara, yang mana melemahkan hubungan tradisional Korea dengan Cina (RRT).¹¹¹ Pada 1895, Jepang berhasil mengalahkan RRT dalam Perang RRT-Jepang (Perang Sino-Jepang) dan pada 1905, Jepang kembali berhasil mengalahkan Rusia yang juga hendak menguasai Korea dalam Perang Rusia-Jepang (1904-1905).¹¹² Kekuasaan Jepang atas Korea sejalan dengan bangkitnya industrialisasi dan militerisme Jepang. Perjanjian Portsmouth pada September 1905 merupakan suatu perjanjian yang dipaksakan oleh Jepang terhadap Korea untuk mengakui Jepang sebagai negara pelindung Korea.¹¹³

¹¹⁰ Budiman Djoko Said., *Loc. cit.*

¹¹¹ Justin Wilson. *The Korean Peninsula: Dynasty, Colonialism, War, and Reunification*, dimuat pada tanggal 6 Desember 2002. Diakses dari <http://web.stanford.edu/class/e297a/The%20Korean%20Peninsula.htm> pada tanggal 15 Juli 2016.

¹¹² Frassminggi Kamasa. *Op. cit.*, hal 8.

¹¹³ Djato Prihantono. *Op. cit.*, hal. 6.

Jepang memperlakukan Korea sebagai lahan taklukan dan menguasai banyak fungsi vital Korea, seperti hubungan luar negeri, kemiliteran, perbankan, dan perhubungan. Jepang secara resmi memulai aneksasinya terhadap Korea pada 1910. Atas aneksasinya, Jepang mengadopsi cara-cara pendudukan militer, menutup surat-kabar dan majalah berbahasa Korea, dan memaksa orang Korea untuk beribadah di Kuil Shinto, serta Jepang juga mendesak beberapa tindakan yang dirancang untuk mengasimilasi penduduk Korea dengan cara melarang pemakaian Bahasa Korea dan nama bernuansa Korea.¹¹⁴

Di bawah penjajahan Jepang, Korea juga dijadikan sebagai pusat militer dan ekonomi Kolonial Jepang. Jepang menempatkan tuntutan ekonomi yang ketat di Korea, mendominasi perekonomiannya, dan mengeksploitasi buruh dan sumber daya alam Korea yang akhirnya membuat banyak orang Korea jatuh dalam kemiskinan. Jepang merekrut paksa 2,6 juta orang tenaga kerja yang merupakan masyarakat Korea, yang mana terdapat sekitar lebih dari 723.000 orang dikirim ke luar negeri serta kota-kota di Jepang.¹¹⁵

Bangkitnya rasa patriotisme Bangsa Korea akibat kekejaman penjajahan Jepang menyebabkan terjadinya *March first Movement* (Gerakan 1 Maret) di Korea.¹¹⁶ Pada 1 Maret 1919, jutaan orang Korea berpartisipasi dalam demonstrasi damai demi kemerdekaan mereka yang secara kejam telah ditindas oleh

¹¹⁴ Justin Wilson. *Loc. cit.*

¹¹⁵ Djato Prihantono. *Op. cit.*, hal. 9.

¹¹⁶ Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea. *Op. cit.*, hal. 204.

orang Jepang.¹¹⁷ Namun demikian, aksi unjuk rasa tersebut memancing kemarahan Jepang, sehingga sekitar 10.500 orang tewas dihukum mati, 23.000 orang luka-luka, dan 47.000 orang lainnya ditangkap sebagai hasil dari tindakan represif Jepang.¹¹⁸

Dalam usahanya terbebas dari kekejaman Jepang, Korea memiliki dua kelompok pejuang yang berbeda aliran.¹¹⁹ Kelompok pertama adalah kelompok komunis yang dipimpin oleh Kim Il Sung, yang mana bertujuan untuk mewujudkan reformasi pertahanan, penghapusan kelas dalam masyarakat, dan menyita semua kekayaan Jepang di Korea. Kelompok komunis Kim Il Sung mendapat banyak dukungan dari RRT, yang juga memusuhi Jepang, serta Uni Soviet. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok liberal yang dipimpin oleh Syngman Rhee yang banyak dipengaruhi oleh Bangsa Barat (Amerika Serikat).

Menjelang kemerdekaan Korea dari Jepang, masih di masa berlangsungnya Perang Dunia II pada 1943, Blok Sekutu (Amerika Serikat, Inggris, dan RRT) melakukan pertemuan di Kairo. Dalam pertemuan tersebut Sekutu membahas tindakan yang akan diambil seandainya Jepang kalah dalam perang dan kemudian menghasilkan Deklarasi Kairo. Dalam Deklarasi Kairo disebutkan bahwa Jepang nantinya tidak diperbolehkan memiliki atau mengasai semua wilayah yang diperolehnya dengan menggunakan kekuatan militer sesudah tahun 1895.¹²⁰

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Djato Prihantono. *Op. cit.*, hal. 7.

¹¹⁹ _____. *Op. cit.*, hal. 8.

¹²⁰ Djato Prihantono. *Op. cit.*, hal. 9.

Semenanjung Korea termasuk wilayah yang disebutkan di dalam Deklarasi Kairo tersebut, sehingga menjadi kabar baik kemerdekaan Korea.

Namun demikian, dalam Konferensi Yalta di Crimea pada Februari 1945, yang dihadiri oleh Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet, diputuskan bahwa akan dibentuk sebuah perwalian terhadap kemerdekaan Korea.¹²¹ Keempat negara yang mewakili Korea, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan RRT. Baik dalam Deklarasi Kairo maupun Konferensi Yalta tidak jelas menyebutkan kelanjutan nasib Korea setelah lepas dari tangan Jepang. Sehingga, ketika Korea akhirnya merdeka dari Jepang pada 1945 dan Sekutu berhasil memenangkan Perang Dunia II, nasib Korea dipertanyakan.

Pasca Perang Dunia II, wilayah Semenanjung Korea menjadi sorotan. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya perebutan kekuasaan di wilayah ini oleh dua negara pemenang perang, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Hal tersebut dimulai dengan hubungan antara Amerika Serikat-Inggris dan Uni Soviet semakin meregang setelah digelarnya Konferensi Yalta. Uni Soviet ingin menyebarluaskan ideologi komunisnya, sedangkan Amerika Serikat berusaha membendung Uni Soviet dengan *containment policy*-nya.

Dalam perwaliannya terhadap Korea, Amerika Serikat-Inggris di selatan dan Uni Soviet-RRT di utara, mengawal penyerahan diri pasukan Jepang yang masih berada di wilayah Semenanjung Korea. Hal ini sesuai dengan isi dari Konferensi Postdam (Juli-Agustus 1945), yaitu Perintah Umum No. 1 tanggal 11 Agustus 1945,

¹²¹ _____. *Op. cit.*, hal. 9-10.

yang mana menyatakan bahwa seluruh pasukan Jepang yang masih berada di utara garis 38° LU (38th *parallel*) akan menyerahkan diri kepada Uni Soviet, sedangkan pasukan Jepang yang masih berada di selatan garis 38° LU akan menyerahkan diri kepada Amerika Serikat.¹²² Namun demikian, sebelum tanggal yang dijanjikan pasukan Uni Soviet telah terlebih dahulu menduduki wilayah utara Semenanjung Korea, sehingga semakin menyulut ketegangan dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Seiring dengan memburuknya hubungan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat tersebut, Semenanjung Korea terbelah menjadi dua bagian.

Di sisi lain, tindakan kedua negara adikuasa tersebut sedikit-banyak dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan keduanya untuk mempertahankan keamanan nasional masing-masing negara sekaligus menyebarkan pengaruh ideologinya, serta demi Jepang. Semenanjung Korea merupakan wilayah yang dianggap sebagai daerah penyangga utama di Asia Timur, yang mana berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan selama belum dikuasai, sehingga apabila Semenanjung Korea telah dikuasai maka harus dipecah menjadi dua demi terciptanya keseimbangan kembali.¹²³ Demikian logika yang dipakai oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin, yang mana keduanya masing-masing berusaha mengamankan wilayah terluarnya dengan merebut sebanyak mungkin *buffer zone*, termasuk di Semenanjung Korea.

¹²² Djato Prihantono. *Op. cit.*, hal. 10-11.

¹²³ Frassminggi Kamasa. *Op. cit.*, hal. 58.

Amerika Serikat dan Uni Soviet yang pada mulanya tidak begitu memperhatikan posisi strategis Korea untuk kepentingan mereka, namun tetap memutuskan untuk mengawasi Korea sehingga dapat didoktrin oleh mereka. Perpecahan yang berujung pada rivalitas dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, membuat Amerika Serikat menarik garis 38° LU demi untuk memisahkan daerah kependudukan Uni Soviet di utara dan Amerika Serikat di selatan Korea. Selain itu Amerika Serikat juga ingin mengamankan Jepang dari pengaruh komunisme Uni Soviet, sekaligus menjadikan garis demarkasi tersebut sebagai tanggul luar pertahanan Amerika Serikat dari pengaruh Uni Soviet.¹²⁴

Pada akhirnya garis tersebut benar-benar memisahkan Korea hingga saat ini. Kependudukan Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam bentuk penyebaran ideologi masing-masing pada rakyat Korea di utara dan selatan mengakibatkan kedua wilayah Korea ini ingin melakukan penyatuan Korea dengan caranya masing-masing, yang mana Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il Sung ingin melakukan penyatuan dengan jalan kekerasan sehingga kaum komunis dapat menguasai seluruh Korea, sedangkan Korea Selatan yang mengalami ketidakstabilan politik di bawah kepemimpinan Syngman Rhee berusaha mengendalikan keadaan dengan bersikap represif yang kemudian menyebabkan sering terjadinya insiden di perbatasan kedua Korea dan penyusupan dari utara ke selatan.¹²⁵ Ketidaksepahaman tersebut kemudian

¹²⁴ _____. *Op. cit.*, hal. 33.

¹²⁵ Djato Prihantono. *Op. cit.*, hal. 18-19.

berujung pada pecahnya Perang Korea, yang mana dimulai dengan invasi Korea Utara ke Korea Selatan pada 25 Juni 1950.

Pada kenyataannya, sejarah Semenanjung Korea selalu didominasi sebagai tempat terjadinya perang dan persaingan kekuasaan dalam usaha untuk mendominasi Kawasan Asia. Pernyebaran pengaruh di Semenanjung Korea terlihat pada beberapa bentrokan kepentingan, seperti yang terjadi pada Perang RRT-Jepang (1894-1895), Perang Rusia-Jepang (1904-1905), dan persaingan Amerika Serikat-Uni Soviet dalam Perang Dingin. Kepentingan Uni Soviet, Amerika Serikat, RRT, Inggris, dan Jepang terhadap Korea. Setiap negara saling memperebutkan Korea meski dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda.

Gencatan senjata mengakhiri pertempuran di Korea pada 1953. Namun gencatan senjata tersebut hanyalah bersifat sementara dan bukan merupakan sebuah perjanjian perdamaian. Kedua negara, Korea Utara dan Korea Selatan, hanya sepakat untuk tidak sepakat untuk menghentikan baku tembak dan memindahkan perang dari medan tempur ke medan diplomatik, sehingga kedua negara terus berada dalam situasi perang di sepanjang garis demarkasi selama lebih dari setengah abad.¹²⁶ Korea Utara yang sangat dipengaruhi oleh Rusia dan RRT mengembangkan paham *juche* (bergantung pada diri sendiri) sebagai dasar atas ekonomi dan politiknya, sehingga berkembang menjadi negara yang terisolasi, sedangkan Korea Selatan yang banyak

¹²⁶ Frassminggi Kamasa. *Op. cit*, hal. 273.

dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan Jepang berkembang menjadi negara industri maju dengan keuntungan ekonomi yang besar.¹²⁷

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri banyaknya insiden-insiden militer yang terjadi di antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang mana menyebabkan krisis di Semenanjung Korea selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 1998 dan 1999 bentrokan angkatan laut terjadi di antara Korea Utara dan Korea Selatan, namun secara drastis berkurang pada tahun 2000 dan 2001. Pada tahun 2002 hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan kembali memburuk dengan Korea Utara yang kembali melakukan pengembangan nuklirnya, sehingga mengawali krisis nuklir di Semenanjung Korea. Pada 29 Juni 2002 terjadi baku tembak antara Korea Utara dan Korea Selatan di laut perbatasan, yang mana menewaskan 4 pelaut Korea Selatan.¹²⁸ Pada 2010, bentrokan antara Korea Utara dan Korea Selatan kembali terjadi lewat baku tembak di antara keduanya. Korea Utara menembakkan 100 granat ke pulau Yeonpyeon, Korea Selatan, sehingga 2 orang tentara Korea Selatan tewas, sementara lebih dari 12 orang mengalami luka-luka dan diantaranya merupakan sejumlah warga sipil.¹²⁹

¹²⁷ Charles K. Armstrong. *Korean History and Political Geography*. Diakses dari <http://asiasociety.org/education/korean-history-and-political-geography> pada tanggal 16 Juli 2016.

¹²⁸ Rasheed Gunawan. 29-6-2002: *Pertempuran 'Berdarah' Korsel-Korut di Laut Perbatasan*, dimuat pada tanggal 29 Juni 2015. Diakses dari <http://m.liputan6.com/global/read/2261017/29-6-2002-pertempuran-berdarah-korsel-korut-di-laut-perbatasan> pada tanggal 24 September 2016.

¹²⁹ Rizki Nugraha. *Reaksi atas Pertempuran antara Korea Utara dan Selatan*, dimuat pada 23 November 2010. Diakses dari <http://m.dw.com/id/reaksi-atas-pertempuran-antara-korea-utara-dan-selatan/a-6260126> pada tanggal 24 September 2016.

Pada 2006, terdapat kemajuan dalam pembicaraan untuk menghentikan uji coba nuklir Korea Utara, namun gagal karena Korea Utara kembali melakukan uji coba senjata nuklirnya.¹³⁰ Hal tersebut membuat RRT, Amerika Serikat, Rusia, Jepang, dan Korea Selatan yang telah menjanjikan bantuan ekonomi dan kerjasama diplomatis kepada Korea Utara kecewa terhadap tindakan Korea Utara, yang mana sebelumnya telah berjanji untuk menghentikan uji coba nuklirnya. Pada 2009 dan 2013 Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklirnya. Hingga pada Januari 2016 Korea Utara berhasil melakukan uji coba bom hidrogen setelah pada tahun 2002, 2006, dan 2013 berhasil dengan uji coba bom atomnya.¹³¹

Di sisi lain, pemerintah Korea Utara dan Korea Selatan pernah mengumumkan pemulihan kembali Korea menjadi negara tunggal sebagai tujuan keduanya. Pada tahun 1972, Korea Utara pernah melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan dengan tujuan untuk bertukar pikiran mengenai segala hal yang diperlukan oleh kedua belah pihak dalam rencananya untuk melakukan reunifikasi.¹³² Kunjungan tersebut menghasilkan satu titik fokus yang berupa prinsip reunifikasi yang dapat diterima oleh kedua negara, yaitu reunifikasi yang damai, otonomi, kesetaraan, dan kesatuan bangsa.¹³³ Reunifikasi yang dicita-citakan oleh kedua Korea

¹³⁰ Anonim. *2006 Catat Kemajuan Program Nuklir Korea Utara*, dimuat pada tanggal 27 Desember 2006. Diakses dari <http://www.voaindonesia.com/a/a-32-2006-12-27-voa9-85072902/6405.html> pada tanggal 24 September 2016.

¹³¹ Anonim. *Seberapa Nyata Ancaman Bom Nuklir Korea Utara?*, dimuat pada tanggal 9 September 2016. Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160909_dunia_korea_utara_program pada tanggal 24 September 2016.

¹³² Djato Prihantono. *Op. cit.*, hal. 106.

¹³³ _____. *Op. cit.*, hal. 107.

merupakan reunifikasi yang damai serta mengarah pada satu kebangsaan dan satu negara, namun dengan dua sistem pemerintahan.

Pada 1990, Korea Utara dan Korea Selatan dalam usahanya untuk menyatukan kedua negara kembali bertemu di Seoul untuk membicarakan reunifikasi tersebut. Kedua negara telah saling setuju dalam isu-isu rekonsiliasi, non-agresi, kerjasama, dan pertukaran di antara Korea Utara dan Korea Selatan dalam *The Agreement on Reconsiliation, Nonaggression, Cooperation, and Exchange Between North and South*, namun gagal karena adanya inspeksi fasilitas nuklir di Korea Utara oleh IAEA (*International Atomic Energy Agency*).¹³⁴ Hal tersebut hampir saja membuat Semenanjung Korea kembali dalam masa peperangan. Namun pada 1994 ketegangan yang sempat terjadi diredam dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian oleh Korea Utara dan Amerika Serikat yang isinya menjanjikan bantuan finansial jika Korea Utara berhenti membuat nuklir.¹³⁵

Rencana reunifikasi kemudian digagas kembali oleh Presiden Korea Selatan, Kim Dae-jung, melalui *Sunshie Policy*-nya terhadap Korea Utara.¹³⁶ Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama di Semenanjung Korea. Kebijakan tersebut akan melonggarkan tensi politik dan militer yang dipertahankan oleh kedua belah pihak, baik antara Korea Utara dan Korea Selatan maupun Korea Utara dengan Amerika Serikat. Namun, ketika George Bush menjabat sebagai Presiden Amerika, ketegangan kembali terjadi dengan

¹³⁴ Justin Wilson. *Loc. cit.*

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

digolongkannya Korea Utara sebagai *Axis of Evil* oleh Bush.¹³⁷ Padahal saat itu, Korea Selatan dan Jepang telah memperlihatkan kemauannya dalam membina hubungan baik dengan Korea Utara, namun dirusak oleh tindakan Amerika Serikat.

Pada lebih dari sepuluh tahun terakhir, Korea Utara sangat gencar mengembangkan teknologi senjata nuklir maupun misilnya. Hal tersebut menyebabkan memanasnya ketegangan di negara-negara Kawasan Asia Timur, khususnya Semenanjung Korea. Terdapat dua alasan utama Korea Utara melakukan program uji coba nuklirnya.¹³⁸ Pertama, adanya pembekuan program nuklir yang bersumber pada plutonium pada tahun 1994 tidak membuahkan hasil yang diharapkan, dimana Korea Utara menuduh Amerika Serikat mengingkari *Agreed Framework* 1994 yang telah disepakati keduanya dengan menunda pengapalan 500.000 ton minyak ke Korea Utara. Amerika Serikat berdalih bahwa terjadinya penundaan tersebut dikarenakan Korea Utara yang telah terlebih dulu mengingkari kesepakatan dengan menjalankan program HEU (*Highly Enriched Uranium*). Kedua, Korea Utara bercita-cita untuk menjadi negara berkapasitas nuklir. Korea Utara berpandangan bahwa dengan memiliki senjata nuklir, Korea Utara dapat menyandang gelar kehormatan, mampu bertahan, serta memiliki sarana untuk memeras negara lain.

Dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara tersebut Amerika Serikat memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Amerika Serikat tidak dapat

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Hassan Wirajuda. 2004. *Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., hal 87-88.

mengambil langkah militer untuk menghentikan program nuklir Korea Utara, karena akan berakibat fatal dengan menciptakan perang, yang mana akan mempengaruhi stabilitas keamanan, sosial, politik, dan ekonomi di Semenanjung Korea.

Melalui jalur diplomasi, Amerika Serikat menghendaki agar Korea Utara menghentikan program nuklirnya dan sebagai imbalannya Amerika Serikat akan memberikan bantuan ekonomi kepada Korea Utara. Namun hal tersebut tidak berjalan dengan baik mengingat posisi Amerika Serikat yang dimusuhi oleh Korea Utara. Amerika Serikat kemudian menggunakan cara lain, yaitu membangun koalisi dengan menyertakan Korea Selatan, Jepang, Rusia dan RRT yang merupakan pihak-pihak yang paling mengkhawatirkan pecahnya perang di Semenanjung Korea, dalam usahanya untuk menekan Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya. Dengan demikian, Amerika Serikat mengusulkan *Six Party Talk* dengan RRT sebagai tuan rumahnya.

Six Party Talk merupakan sebuah pertemuan multilateral yang melibatkan enam negara, yaitu RRT, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia, yang mana bertujuan untuk menemukan jalan damai terhadap masalah keamanan di Semenanjung Korea terkait atas program senjata nuklir Korea Utara. RRT merupakan tuan rumah dari *Six Party Talk* ini, yang mana mulai terbentuk ketika Korea Utara melakukan program nuklirnya pada 2002.¹³⁹ Pertemuan kelima dari pembicaraan enam negara tersebut (2003-2007) menghasilkan suatu kemajuan, yang mana Korea Utara setuju untuk menghentikan sementara program nuklirnya dan

¹³⁹ Alfina Farmaritia Wicahyani. *Op. cit.*, hal 31.

digantikan dengan bantuan bahan bakar serta langkah untuk normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat dan Jepang.¹⁴⁰ Namun pada 2009, Korea Utara memutuskan untuk menarik diri dari *Six Party Talk* dan melanjutkan program nuklirnya, sehingga hal tersebut mengakhiri *Six Party Talk*.

Pada tahun 2012, terbuka sebuah kemungkinan dimulainya kembali *Six Party Talk* dengan diumumkankannya perjanjian '*leap day*' antara Korea Utara dan Amerika Serikat, yang mana Amerika menyetujui memberikan bantuan makanan terhadap Korea Utara sebagai ganti atas penangguhan uji coba misil dan kembalinya pengawas IAEA ke Yongbyon, Korea Utara. Namun hal tersebut gagal karena Korea Utara melakukan peluncuran satelit pada 6 April 2012. Pada 2014, kembali diberitakan bahwa Korea Utara setuju untuk memulai kembali *Six Party Talk*.

¹⁴⁰ Alfina Farmaritia Wicahyani. *Op. cit.*, hal 41-42.

BAB IV

SUBSTANSI KEPENTINGAN TIMBAL-BALIK RRT-KOREA UTARA

Memiliki kesamaan dalam hal ideologi maupun pengalaman sejarah bukanlah merupakan alasan yang cukup bagi RRT maupun Korea Utara untuk mempertahankan hubungan yang telah terjalin selama lebih dari setengah abad. Melainkan masih adanya kepentingan yang saling menggantung di antara kedua negara, yang mana menunggu untuk dicapai oleh kedua negara yang bersangkutan, menjadi penyebab utama mengapa baik RRT maupun Korea Utara tetap mempertahankan hubungan satu sama lain di atas ketegangan yang sering kali melanda pada beberapa tahun terakhir. Bab ini akan membahas substansi kepentingan timbal-balik antara RRT dan Korea Utara dalam bentuk kepentingan politik ideologis dan keamanan strategis.

A. Kepentingan Politik Ideologis

RRT dan Korea Utara merupakan dua negara yang memiliki hubungan kerjasama bilateral yang sangat erat. Terselenggaranya kerjasama bilateral tersebut tidak terlepas dari adanya kesamaan kedua negara dalam usahanya mewujudkan kepentingan nasional negaranya masing-masing. Salah satu dari kepentingan yang kedua negara tersebut coba untuk capai yaitu kepentingan dalam bidang politik ideologis.

Dalam menjalin hubungan bilateral, tidak selalu menuntut pada kedekatan geografis dari kedua negara yang bekerjasama. Namun demikian, kedekatan geografis yang dimiliki oleh RRT dan Korea Utara, membuat keduanya berbagi pengalaman sejarah yang mirip. Hal tersebut terlihat pada fakta bahwa kedua negara sama-sama merupakan negara yang pernah terjajah oleh Jepang dan telah bersama-sama melawan Amerika Serikat selama Perang Korea, serta menganut ideologi komunisme sebagai dasar negaranya masing-masing. Tidak hanya itu, sebagaimana yang dipaparkan oleh Park Jae Kyu, Koh Byung Chul, dan Kwak Tae-Hwan dalam bukunya *The Foreign Relations of North Korea*, bahwa revolusi komunis RRT dan Korea Utara yang berlangsung pada waktu yang kira-kira hampir bersamaan membuat kedua negara memiliki pemikiran yang sama, yaitu memperkuat akar paham komunis di negaranya masing-masing serta sikap kedua negara yang menentang pengaruh Barat (Amerika Serikat).¹⁴¹ Sangat kecilnya jarak di antara kedua negara tersebut membuatnya saling mempengaruhi satu sama lain.

Sebagaimana yang diketahui, komunisme merupakan sebuah ideologi yang dianut oleh kedua negara, RRT dan Korea Utara. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, komunisme adalah sebuah ideologi yang menghendaki penghapusan pranata kaum kapitalis serta berkeinginan membentuk masyarakat kolektif agar tanah dan modal yang dimiliki secara sosial dan pertentangan kelas serta sifat kekuatan menindas dari negara tidak berlangsung lagi.¹⁴² Dengan demikian, pada prinsipnya

¹⁴¹ Jae Kyu Park, Byung Chul Koh, dan Tae-Hwan Kwak. *Loc. cit.*

¹⁴² Jack C. Plano dan Roy Olton. *Loc. cit.*

semua direpresentasikan sebagai milik rakyat dan karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai negara demi kemakmuran rakyat secara merata. Namun, komunisme yang dianut oleh Korea Utara berbeda dengan komunisme yang dianut oleh RRT.

Berdasarkan sejarahnya, Partai Komunis di RRT dan Korea Utara mulai berkembang pada waktu yang hampir bersamaan. Partai Komunis Cina dan Partai Buruh Korea mengadopsi prinsip Marxisme-Leninisme, yaitu penafsiran teoritis dan penerapan praktek doktrin Marxis yang disumbangkan pada ideologi komunisme oleh pemimpin revolusioner Rusia, Vladimir Lyich Lenin.¹⁴³ Namun demikian, hal tersebut berubah pada tahun 1970, yang mana komunisme di RRT bertransformasi sepenuhnya, sehingga membuat RRT bukanlah merupakan negara komunis yang seutuhnya.

Walaupun demikian, RRT tetaplah sekutu penting bagi Korea Utara. Begitupun sebaliknya, Korea Utara tetap menjadi sekutu yang akan selalu mendapatkan dukungan dari RRT, walaupun Korea Utara merupakan aktor yang susah untuk ditebak dan hampir tertutup, bahkan dari pengaruh RRT sekalipun. Hal tersebut sejalan dengan kepentingan timbal-balik di antara RRT-Korea Utara, yang mana menjadi alasan penting dari kelangsungan hubungan keduanya. Bagaimanapun, kepentingan nasional mendasari maupun mengarahkan pembuat keputusan dalam menyusun strategi ataupun merumuskan kebijakan luar negeri negaranya.¹⁴⁴

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

Sebagaimana yang diketahui RRT berperan sebagai sekutu terdekat Korea Utara. RRT merupakan pemasok terbesar dalam sumber pangan; senjata; dan energi bagi Korea Utara dan juga *partner* dagang terbesar Korea Utara.¹⁴⁵ RRT juga merupakan tuan rumah dari *Six Party Talks* yang mempertemukan Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang untuk membahas program nuklir dan misil Korea Utara.¹⁴⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RRT cukup berpengaruh terhadap Korea Utara. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa RRT dapat begitu saja mengendalikan Korea Utara. Faktanya, walaupun RRT ikut memberikan sanksi terhadap tindakan Korea Utara yang terus melanjutkan program senjata misil dan nuklirnya, RRT tetap tidak dapat mengakhiri begitu saja hubungan yang telah lama dijalinnya dengan Korea Utara.

Kesamaan ideologi menjadi salah satu alasan mengapa RRT mempertahankan Korea Utara sebagai sekutu terdekatnya, begitu pun sebaliknya. Perjanjian persahabatan pada 1961 yang ditandatangani Korea Utara bersama dengan RRT semakin menegaskan pentingnya persekutuan di antara kedua negara tersebut. Hanya dengan Korea Utara, RRT membuat perjanjian untuk saling memberikan bantuan dalam konflik maupun perang.

Sebagai negara yang sama-sama berideologi komunis, RRT dan Korea Utara saling menyadari arti pentingnya masing-masing. Peristiwa runtuhnya Uni Soviet pada 1991, menyisakan RRT dan Korea Utara sebagai rekan ideologis yang

¹⁴⁵ Eleanor Albert. *Loc. cit.*

¹⁴⁶ Devi Fitria. *Loc. cit.*

masih tersisa dan berkepentingan di Asia Timur. Keyakinan RRT bahwa jika makin banyak rezim komunis yang jatuh, maka akan semakin sulit pula bagi RRT untuk mengukuhkan legitimasinya, membuat RRT mempertahankan Korea Utara sebagai sekutu terdekatnya.¹⁴⁷ RRT mengambil peran Uni Soviet dalam mendukung kestabilan berdirinya Korea Utara.

Sebagai satu-satunya sekutu terdekat dan dari negara yang sama-sama berideologi komunis di kawasan Asia Timur, RRT dan Korea Utara membutuhkan satu sama lain. RRT yang ingin menyebarkan pengaruhnya di kawasan Asia, terkhusus di kawasan Asia Timur, harus bersaing terlebih dahulu dengan pengaruh Amerika Serikat. Dengan demikian, RRT membutuhkan Korea Utara sebagai *buffer zone* dari pengaruh liberalisme Amerika Serikat. Untuk itu, RRT menjaga eksistensi Korea Utara.

Di sisi lain, ideologi *juche* yang dianut oleh Korea Utara mempertegas bahwa Korea harus mampu berdiri sendiri. Namun dalam proses mewujudkan hal tersebut Korea Utara harus terlebih dahulu membangun ekonominya yang selama ini terkuras untuk kepentingan kemiliteran. Sebagai negara yang dikelilingi oleh banyak persaingan kekuatan dan kepentingan, membuat Korea Utara merasa sangat perlu untuk memperkuat keamanannya dengan cara memperkuat militer dan persenjataannya. Pengembangan persenjataan Korea Utara juga ditujukan untuk memastikan bahwa rezim komunis yang berkuasa tetap bertahan, apalagi dari ancaman luar.

¹⁴⁷ *Ibid.*

Oleh karena itu, Korea Utara membutuhkan RRT untuk menyokongnya setelah banyaknya sanksi internasional yang dilimpahkan pada Korea Utara akibat program pengembangan nuklir dan misilnya. RRT merupakan satu-satunya penyokong utama Korea Utara agar tidak runtuh. Bantuan RRT tersebut secara tidak langsung juga menstabilkan rezim komunis, dinasti Kim (Kim Il Sung, Kim Jong Il, Kim Jong Un), yang berkuasa di Korea Utara. Dengan demikian, RRT dan Korea Utara berbagi kepentingan yang timbal-balik. Kedua negara ingin melestarikan rezim yang berkuasa di negaranya masing-masing.

Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara.¹⁴⁸ Dengan demikian, kepentingan nasional dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara.¹⁴⁹ Sebagaimana yang diketahui bahwa baik RRT maupun Korea Utara adalah negara komunis dengan satu partai yang berkuasa, sehingga kedua negara bekerjasama untuk memastikan bahwa mereka dapat mempertahankan kekuasaan rezimnya masing-masing. RRT sangat percaya bahwa jatuhnya rezim Kim Jong Un akan membawa Korea Utara dalam ketidakpastian serta akan memberikan dampak pula terhadap kelangsungan rezim komunis di RRT. Dengan adanya rezim baru di Korea Utara akan membuat negara-negara barat, seperti Amerika Serikat, untuk membantu atau membentuk aliansi-aliansi baru dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara liberal lainnya. Hal

¹⁴⁸ Jack C. Plano dan Roy Olton. *Loc. cit.*

¹⁴⁹ Mohtar Mas'ood. *Loc. cit.*

tersebut tentunya akan menurunkan stabilitas hubungan antara RRT dan Korea Utara, serta membuat Korea Utara, yang mana selama ini berperan sebagai *buffer zone* bagi RRT, tidak lagi beroperasi dan membawa pengaruh barat makin dekat terhadap RRT.

Begitu pula halnya dengan Korea Utara yang memiliki kepentingan yang sama. Jika Partai Komunis Cina yang menguasai rezim komunis di RRT runtuh, maka RRT tidak akan lagi mampu untuk menyediakan bantuan terhadap Korea Utara. Dengan demikian, ketakutan akan bergantinya rezim tersebut semakin menguatkan hubungan di antara kedua negara, RRT dan Korea Utara. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh P. Anthonius Sitepu bahwa konsep kepentingan nasional inheren dengan kelangsungan hidup yang tercipta dari adanya kepentingan minimum, yang mana kemampuan minimum yang dimaksudkan adalah kemampuan negara untuk mempertahankan integritas wilayahnya (*physical identity*); mempertahankan identitas politik (*political identity*); serta mempertahankan rezim-rezim ekonomi-politik.¹⁵⁰

Korea Utara tidak bisa selamanya bergantung pada bantuan RRT. Sebagaimana yang diketahui, prinsip utama ideologi *juche* Korea Utara, yaitu sikap mandiri dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa bergantung pada negara lain.¹⁵¹ Kebergantungan Korea Utara terhadap bantuan dari RRT bertentangan dengan ideologi *juche* yang dianutnya. Dengan demikian, Korea Utara mengembangkan perseniataannya dengan salah satu tujuannya untuk diperdagangkan ke negara lain.

¹⁵⁰ P. Anthonius Sitepu. *Loc. cit.*

¹⁵¹ Alfina Farmaritia Wicahyani. *Loc. cit.*

Namun di sisi lain, dikte ideologi *juche* yang telah mendarah-daging di Korea Utara dan kebijakannya yang banyak melibatkan kemiliteran membuat dunia luar banyak berpandangan negatif terhadapnya. Hal tersebut membuat RRT berada di posisi strategis, yang mana mempengaruhi Korea Utara dalam interaksinya dengan dunia luar.

Bagaimanapun kepemimpinan dinasti Kim di Korea Utara telah banyak mendapatkan dukungan dari RRT. Baik dalam hal ekonomi maupun kemiliteran, RRT yang merupakan sekutu tradisional Korea Utara berperan penting dalam mendorong terwujudnya hal tersebut. Bergantinya rezim yang berkuasa di RRT yang awalnya otoriter dan tertutup dari dunia luar ke arah yang lebih terbuka tidak menjadi alasan bagi RRT maupun Korea Utara untuk menyudahi hubungan bilateral di antara keduanya. Karena pada intinya, negara-negara harus mementingkan pencapaian kepentingan nasionalnya terlebih dahulu sebelum merisaukan asas moralitas yang belum tentu memenuhi kepentingan negaranya.¹⁵²

Sebagai negara yang sama-sama berjuang dalam melawan Amerika Serikat dalam Perang Korea, RRT dan Korea Utara tentu saja memandang Amerika Serikat sebagai lawan. Namun, baik RRT maupun Korea Utara memiliki ambiguitas yang sama dalam memandang hubungannya dengan Amerika Serikat.¹⁵³ Kedua negara tidak hanya memandang Amerika Serikat sebagai lawan tetapi juga menginginkan hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat.

¹⁵² Mohtar Mas'ood. *Loc. cit.*

¹⁵³ Devi Fitria. *Loc. cit.*

RRT berkepentingan untuk mendapatkan akses dalam sistem ekonomi internasional yang mana didominasi oleh kekuatan Amerika Serikat. Dengan demikian, RRT berusaha tampil sebagai anggota masyarakat dunia internasional yang bertanggungjawab dengan ikut mengancam dan menyetujui beberapa sanksi yang ditujukan pada Korea Utara karena uji coba nuklir dan misil yang dilakukannya. Namun demikian, RRT juga menghindari segala upaya yang dapat menekan atau mengancam stabilitas berdirinya Korea Utara, seperti menolak sanksi ekonomi, yang menurut RRT berlebihan. Sedangkan Korea Utara di sisi lain, berkepentingan untuk mempertahankan kedaulatan serta martabat negaranya dengan mengembangkan senjata-senjata nuklir. Hal tersebut selain dapat mengurangi tekanan militer Amerika Serikat juga diharapkan dapat memandirikan Korea Utara dalam menyokong perekonomian negaranya dengan melakukan perdagangan senjata.

Selama ini kita mengetahui bahwa program uji coba senjata nuklir dan misil Korea Utara merupakan salah satu penyebab utama yang memunculkan ketegangan di Semenanjung Korea. Namun demikian, bagaimanapun Korea Utara juga harus dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kedamaian di Semenanjung Korea. RRT yang menyadari hal tersebut, terus membantu Korea Utara dalam hal ekonomi dan percaya bahwa sanksi keras yang ditujukan terhadap Korea Utara serta pengisolasiannya dari masyarakat internasional bukanlah tindakan yang bijak.

Bagaimanapun, hubungan antara RRT dan Korea Utara tidak dapat terputuskan. RRT dan Korea Utara pada hakekatnya tidak begitu berhubungan baik

dengan negara-negara berpengaruh di Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan maupun Amerika Serikat. Terhadap Amerika Serikat, baik RRT maupun Korea Utara memiliki banyak ketidaksepahaman dalam hal hak asasi manusia, perdagangan, keamanan, dan lain-lain. Terhadap Jepang maupun Korea Selatan, kedua negara berideologi komunis tersebut juga memiliki masalah dalam hal keamanan, persengketaan wilayah dan lain sebagainya. Dengan demikian, RRT dan Korea Utara berada di sisi yang sama.

Tidak ada titik konflik yang mencolok pada hubungan bilateral RRT dan Korea Utara. Pengembangan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara menjadi satu-satunya ‘masalah’ di antara keduanya. Yang mana hal tersebut berkembang menjadi polemik multilateral yang akhirnya mempengaruhi hubungan antara RRT dan Korea Utara serta mengikutsertakan Korea Selatan dan juga Amerika Serikat, begitu pula negara-negara lain. Negara-negara tersebut membutuhkan RRT dan sebagai perantara terhadap Korea Utara. Mereka percaya hanya RRT yang dapat meredam Korea Utara ketika melakukan program uji coba senjatanya.

Pada akhirnya, RRT dan Korea Utara tidak akan berpaling dari satu sama lain. Walaupun ada saat dimana hubungan keduanya menegang, namun dilihat dari jangka panjang hubungan keduanya, hubungan RRT dan Korea Utara akan kembali stabil dan menguat. Hal tersebut tidak melulu karena adanya kesepahaman ideologi di antara keduanya, sehingga RRT dan Korea Utara dapat saling memahami satu-sama

lain. Namun juga karena adanya kepentingan dalam isu keamanan yang menjadi isu penting bagi keduanya.

B. Kepentingan Keamanan Strategis

Negara di dalam dunia internasional dipandang sebagai aktor yang saling berinteraksi dalam arena politik internasional, yang mana tidak memiliki otoritas tunggal yang terpusat, dipenuhi tindakan kekerasan yang sarat akan tuntutan-tuntutan, dan tanpa adanya kesetiakawanan.¹⁵⁴ Fakta bahwa setiap negara berbuat sama, yaitu mengejar kepentingan nasionalnya sendiri, membuat seluruh kesepakatan internasional bersifat sementara dan kondisional atas keinginan negara-negara untuk mematuhi.¹⁵⁵ Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada RRT-Korea Utara. Walaupun kedua negara merupakan sekutu yang berada pada pihak yang sama, baik Korea Utara maupun RRT lebih mementingkan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu dari pada moralitas dalam hubungan keduanya.

Sebagaimana yang diketahui, satu-satunya halangan terbesar dalam hubungan RRT-Korea Utara adalah program uji coba misil yang dilakukan oleh Korea Utara. Pengembangan senjata nuklir Korea Utara di satu sisi memang dapat menghalau serangan dari luar, namun di sisi lain juga berpotensi memicu penurunan stabilitas di Semenanjung Korea serta kawasan Asia Timur. Sedangkan bagi RRT, penurunan stabilitas tersebut sangat berdampak pada perkembangan ekonominya. Hal

¹⁵⁴ P. Anthonius Sitepu. *Loc. cit.*

¹⁵⁵ Robert Jackson dan Georg Sorensen. *Loc. cit.*

tersebut karena banyaknya pelaku usaha yang membatalkan investasinya karena alasan stabilitas keamanan yang rentan di kawasan akibat uji coba senjata nuklir Korea Utara. Oleh karena itu, RRT perlu bersikap sebagaimana perannya sebagai *'responsible stakeholder'* Korea Utara di depan komunitas dunia internasional.¹⁵⁶ RRT berperan sebagai anggota komunitas internasional yang baik dengan ikut menyetujui resolusi hukuman terhadap Korea Utara di satu sisi, namun di sisi lain berperan sebagai sekutu yang baik dengan tetap menyokong kebutuhan Korea Utara.

Di sisi lain, walaupun uji coba misil nuklir tersebut akan menyusahkan sekutunya sendiri, RRT, Korea Utara tetap melakukannya demi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Program pengembangan nuklir bagi Korea Utara merupakan salah satu kunci untuk memberikan kemajuan bagi perekonomian Korea Utara, yaitu sebagai instrument diplomasi untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan juga cara untuk meraih keuntungan lain melalui penjualan teknologi misil. Tidak hanya itu, program pengembangan nuklir tersebut juga sebagai langkah untuk memperkuat keamanan Korea Utara yang memungkinkannya untuk menghalau kekuatan pengaruh negara-negara luar. Dengan demikian, tidaklah salah jika negara dipandang sebagai esensi dasar bagi kehidupan warga negaranya, sehingga ditunjuk untuk merumuskan kepentingan nasional yang di dalamnya memuat kepentingan vital negara yang terkait dengan eksistensinya, seperti pertahanan; keamanan; militer; dan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian dan semua persetujuan;

¹⁵⁶ Shen Dingli. *Loc. cit.*

konvensi; kebiasaan; aturan; bahkan hukum dapat dikesampingkan demi tercapainya kepentingan nasional, sebagaimana RRT dan Korea Utara.

Berbicara mengenai kebijakan keamanan dari Republik Demokratik Rakyat Korea tidak akan jauh dari bahasan tentang peluncuran misil baru-baru ini. Kepemimpinan dinasti Kim selama lebih dari setengah abad telah membawa Korea Utara menjadi negara yang lebih mengutamakan persenjataan untuk menjaga keamanannya dibandingkan dengan mengejar materi untuk menghilangkan bencana kelaparan di negerinya. Walaupun program nuklir dan misil Korea Utara dapat menjadi pemicu ketegangan dalam konflik Semenanjung Korea dan telah ditentang oleh banyak negara, namun hal tersebut tidak dapat menghentikan aksi Korea Utara begitu saja. Korea Utara memiliki sekutu terkuat dan sangat berpengaruh di belakangnya, yaitu RRT.

Asia Timur merupakan sebuah kawasan yang terdiri atas negara-negara yang cenderung untuk memiliki serta mengembangkan senjata nuklir. Korea Utara, RRT serta Jepang merupakan negara-negara yang memiliki nuklir di Asia Timur. Begitu pula RRT, Korea Utara, dan Korea Selatan yang merupakan negara di Asia Timur dengan kekuatan militer terbesar.

Dengan adanya program pengembangan nuklir Korea Utara tidak hanya membuat negara tersebut semakin kuat, namun juga membuat negara sekitarnya semakin meningkatkan kesiagaannya. Hal tersebut terlihat jelas dari sikap Amerika Serikat yang menempatkan pangkalan militernya di Korea Selatan dan Jepang,

sehingga dapat dikatakan Amerika Serikat telah mempersiapkan tentaranya untuk berhadapan langsung dengan tentara Korea Utara. Dengan demikian, kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang sensitif akan isu keamanan. Oleh karena itu, cara-cara diplomatik lebih cocok untuk digunakan dari pada cara-cara militer yang dapat merusak keseimbangan di Semenanjung Korea dan kawasan Asia Timur serta memicu perang dengan resiko kehancuran missal.

Dalam rangka menggunakan cara-cara diplomatik, baik RRT maupun Korea Utara sama-sama menyetujui untuk memulai kembali *Six Party Talk* dan mencoba membicarakan lagi denuklirisasi Korea Utara. Sebagaimana yang diketahui, *Six Party Talk* merupakan sebuah pertemuan multilateral yang melibatkan enam negara, yaitu RRT, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Rusia, yang mana bertujuan untuk menemukan jalan damai terhadap masalah keamanan di Semenanjung Korea terkait atas program senjata nuklir Korea Utara. *Six Party Talk* lebih bersifat spontan dan berasal dari kebutuhan dari dalam kawasan itu sendiri, karena negara-negara yang terlibat di kawasan tersebut membutuhkan kerjasama di antara mereka untuk mengatasi tantangan tersebut.

Namun demikian, alasan yang dimiliki oleh kedua negara ini berbeda satu sama lain. RRT ingin memperkuat hubungannya dengan komunitas internasional dan ingin tetap pada kebijakannya, yaitu untuk menjaga perdamaian, yang mana semua negara bekerjasama di dalamnya dan tidak memihak. Sedangkan di lain pihak, Korea Utara menginginkan bantuan makanan serta ekonomi sebagai ganti atas penangguhan

uji coba misil yang dilakukannya, mengingat beratnya sanksi yang di berikan oleh Dewan Keamanan PBB, dimana hanya menyisakan RRT sebagai satu-satunya penyokong setianya. Walaupun RRT dan Korea Utara berbagi kepentingan yang sama, namun ada kalanya dimana keduanya tidak setuju ataupun memiliki perspektif yang sama.

Dalam isu proliferasi nuklir, RRT mendukung denuklirisasi Korea Utara dan ingin agar Semenanjung Korea bebas dari adanya senjata nuklir. Hal tersebut dikarenakan RRT memerlukan lingkungan kawasan yang stabil untuk dapat fokus dalam membangun perekonomiannya. Namun, adanya pengembangan nuklir Korea Utara dapat mengakibatkan negara-negara lain membenarkan tindakannya untuk ikut mengembangkan kapabilitas nuklir dan misilnya.

Meningkatnya ketegangan di kawasan hanya akan membuat hubungan yang susah payah dibangun oleh RRT dengan komunitas internasional, terutama hubungannya dengan Korea Selatan dan Jepang akan retak. Selanjutnya, hal yang mungkin terjadi adalah adanya perlombaan senjata nuklir di kawasan Asia Timur, yang mana akan menyebabkan ketegangan di kawasan. RRT tidak menginginkan hal tersebut.

Mengingat banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh program pengembangan nuklir Korea Utara terhadap RRT membuatnya mau tidak mau mempertanyakan hubungan persekutuannya dengan Korea Utara. RRT yang telah menjadi negara dengan kekuatan terbesar di Asia dengan kekuatan militer yang

mumpuni serta perkembangan ekonomi yang maju pesat harus terbebani oleh hubungan persekutuannya dengan Korea Utara. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa RRT masih membutuhkan Korea Utara.

Keberpihakan Korea Utara pada RRT memberikan tambahan kekuatan bagi keamanan RRT dan sebaliknya kehancuran hubungan RRT-Korea Utara akan berdampak sangat merugikan bagi RRT. Jika dimisalkan Korea Utara beralih dari RRT dan kemudian beraliansi dengan negara lain seperti Amerika Serikat maka hal tersebut tidak hanya merugikan RRT secara ekonomi, mengingat semua bantuan yang telah diberikan RRT kepada Korea Utara, tetapi juga akan melemahkan keamanan RRT.

Oleh karena itu, RRT mengambil peran sebagai tuan rumah dari *Six Party Talk*, dengan salah satu tujuannya yaitu untuk menghalau Amerika Serikat yang berusaha menanamkan pengaruhnya di Korea Utara lewat penolakannya terhadap program pengembangan nuklir Korea Utara. Selain itu, RRT juga berperan banyak dalam *Six Party Talk* dalam usahanya membujuk Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya. Tidak hanya itu, RRT juga bekerjasama dengan komunitas internasional untuk menghalangi proliferasi nuklir di kawasan Asia Timur. RRT ingin tetap pada kebijakannya, yaitu untuk menjaga perdamaian, yang mana semua negara bekerjasama di dalamnya dan tidak memihak.

Korea Utara di lain pihak tidak mau menghentikan program nuklirnya dan bertujuan untuk menjadi negara berkapasitas nuklir. Korea Utara menginginkan agar

komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, mengakui Korea Utara sebagai negara berkapasitas nuklir dan membantah bahwa dengan memiliki senjata nuklir negara-negara dapat mencegah terjadinya perang di Semenanjung Korea. Hal tersebut bertolakbelakang dengan pemikiran RRT yang menganggap tindakan Korea Utara merupakan faktor yang dapat memicu terjadinya perang di Semenanjung Korea, yang mana mendorong pasukan Amerika Serikat maupun Korea Selatan ke perbatasan RRT.

Kemungkinan terjadinya perang di Semenanjung Korea sangatlah tipis. Pertama, Amerika Serikat menempatkan banyak pangkalan militernya di kawasan Asia Timur, yaitu di Korea Selatan dan Jepang. Hal tersebut tentu saja memberikan tekanan tersendiri terhadap krisis di Semenanjung Korea, mengingat pengembangan misil Korea Utara yang juga ditujukan sebagai penangkal pengaruh militer Amerika Serikat. Kedua, adanya kemungkinan dimana Amerika Serikat mengambil tindakan militer, ataupun sebaliknya, ketika Korea Utara mengambil tindakan militer yang benar-benar serius, hal tersebut tidak mustahil akan menimbulkan konflik perang nuklir di Semenanjung Korea.

RRT sangat sadar bahwa jika perang terjadi di Semenanjung Korea maka dirinya juga akan ikut terlibat di dalamnya. Segala sesuatu yang telah diperjuangkan oleh RRT untuk menjaga perdamaian di Semenanjung Korea, seperti kerjasama ekonomi yang dilakukannya dengan Korea Selatan dan Jepang serta usahanya untuk membina perekonomian serta investasi yang telah banyak ditanam di Korea Utara

akan musnah begitu saja, yang mana hal tersebut tentu saja akan sangat merugikan bagi RRT. Tidak hanya itu, RRT akan kehilangan Korea Utara yang selama ini menjadi daerah penyangganya.

Bagaimanapun, RRT telah terikat dengan Korea Utara dalam Traktat Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Timbal-Balik yang telah ditandatangani oleh kedua pihak pada 1961. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam perjanjian tersebut RRT dan Korea Utara akan saling membantu baik dalam kondisi konflik maupun perang. Dengan demikian, RRT sebagai tuan rumah dari *Six Party Talk* ingin memastikan bahwa Semenanjung Korea dapat terbebas dari proliferasi nuklir sehingga perdamaian dapat tetap terjaga di kawasan Asia Timur.

Menjaga hubungan baik dengan Korea Utara serta mencegah agar rezim Korea Utara agar tidak runtuh adalah salah satu tujuan RRT. Namun demikian, terdapat ambiguitas yang membuat hubungan antara RRT dan Korea Utara terkesan rumit. Tindakan Korea Utara dalam mengembangkan program nuklirnya membuat RRT beberapa kali menyetujui resolusi Dewan Keamanan PBB, yang mana membuat hubungannya dengan Korea Utara berkembang ke arah pertentangan. Namun demikian, RRT tetap menaati perjanjian persahabatan yang telah ditandatanganinya bersama Korea Utara pada 1961, yang mana hal tersebut mendukung Korea Utara dalam melanjutkan program nuklirnya. Di sisi lain, Korea Utara mengartikan ambiguitas dari tindakan RRT tersebut sebagai tanda untuk tetap mempertahankan penangkal nuklirnya.

Bagaimanapun, eksistensi RRT sangat terikat dengan Korea Utara, begitu pun sebaliknya. RRT menjamin stabilitas di Semenanjung Korea, yaitu pertama, memastikan perekonomian Korea Utara dapat meningkat dengan adanya reformasi ekonomi. Kejatuhan perekonomian Korea Utara hanya akan member beban yang lebih berat terhadap RRT, yang mana RRT secara tidak langsung menjadi penanggungjawab dalam menyediakan makanan serta kebutuhan dasar lain untuk Korea Utara. Selain itu, RRT juga harus menanggung terjadinya peningkatan pengungsi dari Korea Utara ke wilayah RRT. Kedua, RRT ingin memastikan keselamatan dari investasi yang telah banyak ditanam olehnya di Korea Utara, sehingga tidak hangus begitu saja. Ketiga, stabilnya hubungan antara RRT dan Korea Utara akan menjamin ketersediaan *buffer zone* bagi RRT. Posisi strategis dan letak geografis Korea Utara merupakan tameng bagi RRT yang melindunginya dari Korea Selatan, Jepang, serta Amerika Serikat.

Saat ini, hubungan antara RRT dan Korea Utara telah mengalami banyak sekali perubahan sejak pertama kali bertukar hubungan pada Perang Korea. Sebagaimana sistem internasional yang terus berganti, kedua negara juga kadang kala memiliki perbedaan tersendiri dalam kepentingan nasional yang harus mereka lindungi. Hubungan antara RRT dan Korea Utara adalah hal yang rumit dan akan terpaku pada keuntungan semata yang dalam arti strategis dan bukan karena RRT dan Korea Utara adalah sekutu tradisional.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, tentang hubungan dan kepentingan timbal-balik RRT-Korea Utara di Semenanjung Korea, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. RRT dan Korea Utara merupakan dua negara komunis di Asia Timur yang telah menjalin hubungan kerjasama bilateral selama lebih dari 60 tahun, terhitung sejak tahun 1949. Hal ini dapat terjadi oleh karena kedua negara, baik RRT maupun Korea Utara, masing-masing memiliki kepentingan serta kebutuhan yang harus segera dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan, yang mana kedua negara tersebut membutuhkan satu sama lain untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian, hubungan RRT-Korea Utara didasari atas adanya kepentingan timbal-balik di antara keduanya dan bukan karena adanya ikatan moral sebagai sekutu tradisional.
2. Wujud kepentingan timbal-balik antara RRT dan Korea Utara di Semenanjung Korea dapat jelas terlihat dalam kepentingan politik ideologis dan kepentingan keamanan strategis di antara keduanya. Hal ini dapat terjadi, dikarenakan kedua negara sama-sama memiliki kepentingan yang mendesak dalam mempertahankan rezim komunis dan keamanan di negaranya masing-masing, sehingga adanya

kesamaan latar belakang dari kedua negara tersebut membuat RRT dan Korea Utara saling membutuhkan dan akhirnya bekerjasama untuk mencapai kepentingan-kepentingan tersebut.

B. Saran-Saran

1. RRT dan Korea Utara dalam mencapai kepentingannya masing-masing, hendaknya sedapat mungkin tidak merugikan atau mengabaikan kepentingan negara-negara lain, khususnya negara-negara di Asia Timur. Dengan kata lain, upaya pencapaian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan tidak memberlakukan kebijakan yang merugikan negara-negara lain demi kepentingannya masing-masing.

Upaya pencapaian kepentingan Korea Utara sebaiknya tidak bertumpu pada pengembangan nuklir yang menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan eskalasi konflik di Semenanjung Korea. Di sisi lain, RRT dalam upaya mencapai kepentingannya seharusnya dapat lebih tegas dalam memutuskan kebijakannya terhadap Korea Utara, sehingga dengan adanya ketegasan dari RRT tersebut, Korea Utara diharapkan dapat dengan bijak menghentikan program nuklir yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ganesan, N dan Ramses Amir. 2010. *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jemadu, Aleksius. 2014. *Politik Global dalam Teori dan Praktik Edisi 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kamasa, Frassminggi. 2016. *Perang Korea: Tragedi Terbelahnya Semenanjung Korea dalam Perang yang Belum Selesai*. Yogyakarta: Narasi.
- Mas'oed, Mohtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Park, Jae Kyu, Byung Chul Koh, dan Tae-Hwan Kwak. 1987. *The Foreign Relations of North Korea-New Perspectives*. Colorado: Westview Press.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yayan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Plano, Jack C. dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional (Edisi Ketiga)*. Alih bahasa: Wawan Juanda. Universitas Michigan Barat.
- Prihantono, Djato. 2013. *Perang Korea: Konflik Dua Saudara*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Rudy, T. May. 2002. *Studi Strategis dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sitepu, P. Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- S, Nuraeni, Deasy Silvya, dan Arifin Sudirman. 2010. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wirajuda, Hassan. 2004. *Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonnesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Tesis

Wahyura, Leny. 2008. Diplomasi Jepang dalam Menghadapi Masalah Penculikan Warga Negara Jepang oleh Korea Utara. *Program Pascasarjana Universitas Indonesia*, 15-93. Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/117251-T%2024963-diplomasi%20jepang-analisis.pdf> pada tanggal 1 Februari 2016.

Wicahyani, Alfina Farmaritita. 2010. Dampak Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara terhadap Kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur. *Pascasarjana Universitas Indonesia*, 20-56. Diakses dari <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132725-T%2027803-Dampak%20pengembangan-Tinjauan%20literatur.pdf> pada tanggal 30 November 2015.

Jurnal

Dingly, Shen. (2006). *North Korea's Strategic Significance to China*. World Security Institute. China Security, Autumn 2006. 19-34. Diakses dari <http://www.issuelab.org/resources/434/434.pdf> pada tanggal 13 November 2016.

Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea, edisi 2012. *Korea: Dulu dan Sekarang*, 1-286. Diakses dari http://www.korea.net/koreanet/fileDownload?fileUrl=/content/PDF/general/2012_facts_indonesian.pdf pada tanggal 23 Maret 2016.

Marsingga, Prilla. Desember 2014. Proliferasi Nuklir Korea Utara: Penangkalan dan Diplomasi Kekerasan. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi (JIPSI)*. Vol.4. No.II. 1-16. Diakses dari <http://abstrak.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/download/160/163> pada tanggal 13 November 2016.

Purwono, Andi dan Ahmad Saifuddin Zuhri. Juni 2010. *Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional*. SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional. Vol. 7. No. 2. 1-19. Diakses dari <http://www.unwahas.ac.id/publikasiilmiah/index.php/SPEKTRUM/article/download/483/605> pada tanggal 13 November 2016.

Internet

Charles K. Armstrong. *Korean History and Political Geography*. Diakses dari <http://asiasociety.org/education/korean-history-and-political-geography> pada tanggal 16 Juli 2016.

Budiman Djoko Said. 29 April 2015. *Petak Umpet Versus Korea Utara di Semenanjung Korea*. Diakses dari <http://www.fkpmaritim.org/petak-umpet-versus-korut-di-semenanjung-korea/>, pada tanggal 1 Februari 2016.

Communism and Computer Ethics. *History and Background of Communism*. Diakses dari <http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs201/projects/communis-computing-china/> pada tanggal 16 Juli 2015.

_____. *Communism in China*. Diakses dari <http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs201/projects/communis-computing-china/> pada tanggal 14 Juli 2015.

Elizabeth Philipp. 14 Maret 2013. *UN Security Council Resolutions on North Korea*. Diakses dari <https://www.armscontrol.org/factsheets/UN-Security-Council-Resolutions-on-North-Korea#top> pada tanggal 2 Agustus 2016.

James Graham. *Comparison of Chinese and North Korean Communism Up To The 1980s*. Diakses dari http://www.onthisday.com/asia/chinese_korean_communism.php pada tanggal 16 Juli 2016.

Justin Wilson. 6 Desember 2002. *The Korean Peninsula: Dynasty, Colonialism, War, and Reunification*. Diakses dari <http://web.stanford.edu/class/e297a/The%20Korean%20Peninsula.htm> pada tanggal 15 Juli 2016.

Pramod Sedhain. 2015. *Geopolitical Significant of the Korean Peninsula*. Diakses dari <http://thedailyjournalist.com/the-historian/geopolitical-significant-of-the-korean-peninsula/> pada tanggal 11 Juli 2016.

Treaty of Friendship, Cooperation and mutual Assistance Between the People's Republic of China and the Democratic People's Republic of Korea (1961). Diakses dari https://www.marxists.org/subject/china/documents/china_dprk.htm, pada tanggal 14 maret 2016.

Wilson Center. *China-North Korea Relations*. Diakses dari <http://digitalarchive.wilsoncenter.org/collection/115/china-north-korea-relations> pada tanggal 16 Juli 2016.

Shen Zhihua dan Yafeng Xia. 30 Mei 2012. *China and the Post-War Reconstruction of North Korea, 1953-1961*. Diakses dari <http://www.wilsoncenter.org/publication/china-and-the-post-war-reconstruction-north-korea-1953-1961> pada tanggal 10 Juli 2016.

Worldatlas. *Korean Peninsula Map, Map of North and South Korea, Korea Information and Facts*. Diakses dari <http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/koreanpn.htm>, pada tanggal 11 Juli 2016.

Yubo Jiang. *North Korea and China: The Differentiation of Socialism*. Diakses dari http://econc10.bu.edu/economic_systems/Country_comparisons/China_north_korea.htm pada tanggal 16 Juli 2016.

Berita

Albert, Eleanor. 8 Februari 2016. *The China-North Korea Relationship*. Diakses dari <http://www.cfr.org/china/china-north-korea-relationship/p11097> pada tanggal 10 Juli 2016.

Anonim. 27 Desember 2006. *2006 Catat Kemajuan Program Nuklir Korea Utara*. Diakses dari <http://www.voaindonesia.com/a/a-32-2006-12-27-voa9-85072902/6405.html> pada tanggal 24 September 2016.

Anonim. 9 September 2016. *Seberapa Nyata Ancaman Bom Nuklir Korea Utara?*. Diakses dari

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160909_dunia_korea_utara_program pada tanggal 24 September 2016.

Beeson, Mark. 8 Februari 2016. *Why Does China Continue to Protect North Korea? It Has a Lot Less to do With Communism Than You'd Think*. Diakses dari <http://www.independent.co.uk/voices/why-does-china-continue-to-protect-north-korea-it-has-a-lot-less-to-do-with-communism-than--you-d-a6860881.html> pada tanggal 16 Juli 2016.

Chunsan, Mu. 10 Maret 2016. *Why, China-North Korea Relations Can't Be Broken*. Diakses dari <http://thediplomat.com/2016/03/why-china-north-korea-relations-can-t-be-broken/> pada tanggal 10 Juli 2016.

Fitria, Devi. 22 Desember 2010. *Persepsi China tentang Korea Utara*. Diakses dari <http://historia.id/mondial/persepsi-china-tentang-korea-utara> pada tanggal 23 Maret 2016.

Gunawan, Rasheed. 29 Juni 2015. *29-6-2002: Pertempuran 'Berdarah' Korsel-Korut di Laut Perbatasan*. Diakses dari <http://m.liputan6.com/global/read/2261017/29-6-2002-pertempuran-berdarah-korsel-korut-di-laut-perbatasan> pada tanggal 24 September 2016.

Jourdan, Adam. 19 Mei 2013. *China Seeks Release of Fishing Boat Seized By North Korea*. Diakses dari <http://mobile.reuters.com/article/idUSBRE94I09620130519> pada tanggal 12 Juli 2016.

Hein, Matthias von. 27 Juni 2013. *Simalakama Cina di Semenanjung Korea*. Diakses dari <http://www.dw.com/id/simalakama-cina-di-semenanjung-korea/a-16911717>. pada tanggal 30 November 2015.

Messwati, Elok Dyah. 4 Januari 2015. *Panmunjom, Korea yang Terbelah*. Jakarta: Kompas.

Nugraha, Rizki. 23 November 2010. *Reaksi atas Pertempuran antara Korea Utara dan Selatan*. Diakses dari <http://m.dw.com/id/reaksi-atas-pertempuran-antara-korea-utara-dan-selatan/a-6260126> pada tanggal 24 September 2016.